

## LAPORAN PENELITIAN KEBIJAKAN

### EFEKTIVITAS PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN DI SUMATERA BARAT

Oleh:

Drs. Alwen Bentri, M.Pd.  
Prof. Dr. H. Anas Yasin, M.A.  
Drs. Afrizal Sano, M.Pd. Kons.  
Dr. Herman Nirwana, M.Pd. Kons.  
Drs. Mudjiran, M.S. Kons  
Dr. Marjohan, M.Pd. Kons

Penelitian dibiayai dengan DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan  
Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006 dengan Surat Perjanjian  
Kerja Nomor; 7019-17/G1/LK/2006 Tanggal 14 Agustus 2006

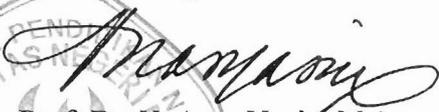
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
NOVEMBER 2006

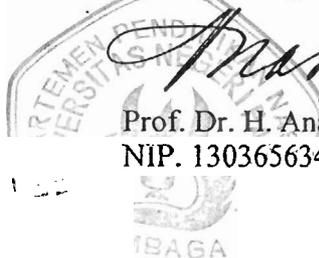
**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN PENELITIAN KEBIJAKAN**

1. Tema Penelitian	Perluasan dan Pemerataan
2. Judul Penelitian	Efektivitas Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Sumatera Barat
3. Ketua Peneliti a. Nama Lengkap dan Gelar b. Jenis Kelamin c. Pangkat, Golongan d. NIP e. Fakultas f. Universitas/Institut g. Nama Bank & No. Rekening h. Lembaga i. Alamat j. Telp/Fax/e mail	Drs. Alwen Bentri, M.Pd Laki-laki Lektor Kepala, IV a 131584115 Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang Bank Mandiri, 111-00-8400007-0 Lembaga Penelitian UNP Jl. Prof.Dr. Hamka Kampus UNP 0751-443450/08126628167
4. Lama Penelitian	3 bulan
5. Biaya yang diperlukan	Rp. 39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
6. Sumber Pembiayaan	DIPA Balitbang Depdiknas Tahun 2006 Kegiatan Pembaruan Sistem Pendidikan Nasional.

Mengetahui:

→ Ketua Lembaga Penelitian UNP

  
Prof. Dr. H. Anas Yasin, M.A.  
NIP. 130365634



Padang, 29 November 2006  
Ketua Peneliti,



Drs. Alwen Bentri, M.Pd.  
NIP. 131584115

## HALAMAN IDENTITAS

### 1. Judul Penelitian

Efektivitas Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Sumatera Barat

### 2. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap dengan Gelar : Drs. Alwen Bentri, M.Pd.  
b. Bidang Keahlian : Kependidikan  
c. Jabatan/Pekerjaan : Dosen  
d. Unit Kerja : Fakultas Ilmu Pendidikan  
e. Alamat Surat : Lembaga Penelitian UNP  
Jl. Prof.Dr. Hamka Kampus UNP  
Kode Pos 25131  
f. Telepon & HP : 0751-443450/08126628167

### 3. Anggota Peneliti

No	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Institusi	Alokasi Waktu	
				Jam/Mg	Bulan
1	Prof.Dr. H. Anas Yasin, M.A.	Kependidikan	UNP	10	3
2	Drs. Afrizal Sano, M.Pd.Kons	Kependidikan	UNP	10	3
3	Dr. Herman Nirwana, M.Pd. Kons.	Kependidikan	UNP	10	3
4	Drs. Mujiran, M.S.Kons	Kependidikan	UNP	10	3
5	Dr. Marjohan, M.Pd.Kons	Kependidikan	UNP	10	3

4. Subjek Penelitian: Sekolah, Dinas Pendidikan, Orang Tua, Siswa Putus Sekolah, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan  
5. Periode Pelaksanaan Penelitian: 1 September s.d 30 November 2006  
6. Jumlah Anggaran yang diusulkan: Rp. 39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)  
7. Lokasi Penelitian: Sumatera Barat  
8. Hasil/Rekomendasi yang ditargetkan, memberi penjelasan untuk merumuskan pola wajib belajar sembilan tahun agar mencapai sasaran  
9. Perguruan Tinggi Pengusul: Universitas Negeri Padang  
10. Instansi lain yang terlibat: ---

## **EXECUTIVE SUMMARY**

# EXECUTIVE SUMMARY

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan wajib belajar di Indonesia dimulai dengan wajib belajar sekolah dasar 6 tahun (Wajar 6 Tahun), dan itu telah dicapai pada tahun 1984 dengan mendapat penghargaan *Aviciena* dari UNESCO (Tilaar, 2000). Kesuksesan Wajar 6 Tahun (W-6-T) dilanjutkan dengan pelaksanaan Wajar 9 Tahun (W-9-T) atau wajib belajar sekolah lanjutan tingkat pertama. Pelaksanaan W-9-T dimulai tahun 1994, ketika Wardiman Djojonegoro menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Penyelesaian penuntasan W-9-T pada awalnya ditetapkan pada tahun 2004. Namun karena adanya krisis ekonomi sejak tahun 1998 yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin, dan karena keterbatasan keuangan negara, maka penuntasan W-9-T diundur menjadi tahun 2009. Akibat krisis ekonomi itu jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah dari 22 juta pada tahun 1997 menjadi 40 juta jiwa pada tahun 1998. Dampak dari krisis ekonomi tersebut para orangtua murid banyak yang tidak mampu menyekolahkan anak di Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) (Hasanuddin, 2000).

Sehubungan dengan jumlah anak putus sekolah tersebut, apabila dilihat berdasarkan daerah, angka putus sekolah lebih banyak di daerah pinggiran (Levine dan Havighurst, 1992). Angka putus sekolah di daerah pedesaan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan daerah semi perkotaan (Boediono, Jiyono, Indriyanto, dan Swaryani, 1999). Sehubungan dengan itu, di Provinsi Sumatera Barat persentase anak putus sekolah untuk SD/MI adalah 0.75 %, SMP/MTs adalah 1.71% (Data Pendidikan Sumatera Barat 2003/2004). Hal ini menunjukkan bahwa angka putus sekolah di tingkat SMP/MTs lebih besar setelah SD/MI. Artinya banyak anak usia sekolah 13-15 tahun yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke tingkat SLTP. Perhitungan kuantitatif di atas memberi makna bahwa pembangunan pendidikan dasar di Sumatera Barat belum mencapai target yang diharapkan.

### B. Perumusan Masalah

Permasalahan penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Berapa jumlah anak usia SD/MI dan SMP/MTs, serta angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM) ?
2. Berapa jumlah lulusan SD/MI dan SMP/MTs, jumlah dan sebaran anak putus sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs?
3. Bagaimana faktor internal anak-anak yang putus sekolah?

4. Bagaimana faktor eksternal anak-anak yang putus sekolah?
5. Upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam pelaksanaan W-9-T?
6. Berdasarkan jawaban pertanyaan tersebut diberikan rekomendasi bagaimana pola pelaksanaan Wajar 9 tahun agar mencapai sasaran yang diinginkan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan:

1. Jumlah anak usia SD/MI dan SMP/MTs, serta angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM) di Sumatera Barat.
2. Jumlah lulusan SD/MI dan SMP/MTs, jumlah dan sebaran anak putus sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Sumatera Barat.
3. Faktor internal anak-anak yang putus sekolah.
4. Faktor eksternal anak-anak yang putus sekolah.
5. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam pelaksanaan W-9-T.
6. Rekomendasi tentang pola pelaksanaan W-9-T agar mencapai sasaran yang diinginkan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut;

1. Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan untuk pertimbangan bagi orang tua, kepala sekolah, dan komite sekolah dalam menyikapi program wajib belajar, khususnya untuk keperluan mengantisipasi anak putus sekolah.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan dibidang pendidikan dalam mengambil keputusan yang tepat berkaitan dengan kesuksesan wajib belajar 9 tahun.

### **D. Hasil yang Diharapkan**

Hasil yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Data jumlah anak usia SD/MI dan SMP/MTs serta APK dan APM SD/MI dan SMP/MTs
2. Data jumlah lulusan SD/MI dan SMP/MTs dan anak putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs
3. Data tentang faktor internal yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan W-9-T, baik yang menyangkut siswa yang bersangkutan, orang tua, masyarakat, pimpinan Diknas, pimpinan sekolah dan guru yang memiliki siswa putus sekolah.
4. Data faktor eksternal yang berupa sarana, prasarana, dan fasilitas lainnya yang menjadi sumber hambatan pelaksanaan W-9-T.
5. Data tentang berbagai upaya yang telah dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan W-9-T, seperti pihak Diknas, Sekolah, Orangtua dan masyarakat.
6. Kebijakan yang bisa direkomendasikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan W-9-T agar program tersebut mencapai sasaran pada tahun 2009.

## **E. Ruang Lingkup**

Lingkup kegiatan penelitian ini mencakup lima hal, yaitu :

1. Mendeskripsikan jumlah anak usia SD/MI dan SMP/MTs dan APK SD/MI dan SMP/MTs
2. Mengungkapkan jumlah Lulusan SD/MI dan SMP/MTs dan anak putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs
3. Mengungkapkan berbagai faktor internal yang menyebabkan kurang efektifnya wajar sembilan tahun.
4. Mengungkapkan faktor eksternal apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan wajar sembilan tahun.
5. Dari hasil pengungkapan faktor internal maupun faktor eksternal yang menjadi kendala pelaksanaan Wajar sembilan tahun itu, dan upaya yang dilakukan untuk menyukseskan W-9-T. Dari hasil temuan penelitian dan pembahasan tersebut lahirlah beberapa kesimpulan dan rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan Wajar sembilan tahun dan usaha menanggulangnya atau mengatasi kendala yang ada demi suksesnya kebijakan tersebut.

## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Kebijakan**

Tahun 1983 dimulai program wajib belajar 6 tahun untuk anak usia 7 – 12 tahun secara nasional. Sukses yang dicapai dengan program wajib belajar 6 tahun ini memotivasi pemerintah untuk meningkatkan program wajib belajar menjadi 9 tahun sejak bulan Mei tahun 1994 yang lalu. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijaksanaan pendidikan dasar 9 tahun sampai dengan tingkat SLTP/satuan pendidikan sederajat adalah wajib belajar bagi semua warga negara. Pada mulanya kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini diharapkan bisa tuntas pada tahun 2004. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia lebih siap memasuki pasar global, baik pasar bebas AFTA, maupun APEC, tetapi kemudian diundur menjadi tahun 2008 dengan alasan karena krisis ekonomi dan krisis lainnya yang terjadi sejak 1997 (Balitbang Diknas, 2003).

Gerakan Wajar mendapatkan pijakan yang lebih kuat lagi pada UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional. Penekanan yang lebih dirasakan tampak pada tanggung jawab pembiayaan wajib belajar itu sendiri dan penyelenggaraannya, yaitu pemerintah pusat dan daerah. Mudah-mudahan peningkatan Wajar ini dapat mengejar ketertinggalan pelaksanaan Wajar dari bangsa yang telah maju itu.

### **B. Tujuan Wajib Belajar**

Melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun diharapkan dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang perlu dimiliki semua warga negara sebagai bekal untuk dapat hidup dengan layak di masyarakat

dan dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi baik ke lembaga pendidikan sekolah ataupun luar sekolah. Dengan wajib belajar, mereka akan dapat menjalani hidup dan menghadapi kehidupan dalam masyarakat. Di samping itu, menurut May, (1998) adalah merangsang aspirasi pendidikan orangtua dan anak yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja penduduk secara nasional. Untuk itu, target penyelenggaraan W-9-T bukan semata-mata sekedar untuk mencapai target angka partisipasi secara maksimal, namun perhatian yang sama ditujukan juga untuk memperbaiki kualitas pendidikan dasar yang sekarang ini masih jauh dari standar nasional.

### **C. Pelaksanaan Wajib Belajar**

Pelaksanaan program W-9-T di Indonesia memiliki empat ciri utama, yaitu (1) dilakukan tidak melalui paksaan tetapi bersifat himbauan, (2) tidak memiliki sanksi hukum tetapi menekankan tanggung jawab moral dari orang tua untuk menye-kolahkan anaknya, (3) tidak memiliki undang-undang khusus dalam implementasi program, (4) keberhasilan dan kegagalan program diukur dari peningkatan partisipasi bersekolah anak usia 6 - 15 tahun. Menurut Ibrahim (1992) pelaksanaan W-9-T dilakukan melalui jalur sekolah maupun luar sekolah. Melalui jalur sekolah meliputi program 6 tahun di SD/MI dan program 3 tahun di SMP/MTs. Untuk tingkat SD diberlakukan pada SD reguler, SD Kecil, SD Pamong, SD terpadu, MI, Pondok Pesantren, SDLT, dan kelompok belajar Paket A. Sedangkan untuk tingkatan SMP/MTs dilaksanakan SMP/MTs Reguler, SMP Kecil, SMP Terbuka dan SMP-LB dan kelompok belajar Paket B.

### **D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi**

Faktor internal dari diri siswa merupakan faktor utama dan kunci keberhasilan pelaksanaan W-9-T. Di samping itu juga faktor eksternal, seperti yang dikemukakan oleh Ibrahim (1992) dan Syarif (1994) yang meliputi upaya (1) peningkatan jumlah daya tampung yang perlu didahului oleh pendataan dan pemetaan sekolah, (2) penyediaan sarana yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya, (3) pengajuan anggaran yang lebih besar untuk anggaran pendidikan, termasuk pemberian bantuan kepada orang tua yang kurang mampu melalui pemberian beasiswa, keringanan atau pembebasan uang sekolah, (4) peningkatan program orang tua asuh, penyuluhan dan publikasi kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan dalam rangka mencapai hidup dan kehidupan yang layak dan lebih baik di masa depan, dan (5) penetapan kebijakan yang bersinergik oleh berbagai kalangan yang bertanggung jawab.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif jenis survei. Adapun subjek yang disurvei yaitu jumlah anak yang mengikuti W-9-T dan mereka yang lulus

dan putus sekolah, faktor internal dan eksternal yang menyebabkan anak putus sekolah, upaya yang dilakukan pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat serta pelaksanaan W-9-T pada umumnya. Rancangan penelitian termasuk penelitian deskriptif-analitik.

## **B. Subyek Penelitian**

Populasi penelitian meliputi jumlah anak usia SD/MI dan SMP/Mts, siswa SD/MI dan SMP/MTs negeri dan swasta, serta mereka yang putus sekolah, orang tua dari siswa yang putus sekolah tersebut, pimpinan Depdiknas (provinsi, kab/kota dan kecamatan), Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Jumlah SD/MI dan SMP/MTs se Sumatra Barat. Berhubung jumlah populasi sangat besar, maka perlu dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *Multy Stage*.

Sampel diambil dengan teknik *stratified proportional sampling* pada tahap awal, dan *proportional random sampling* pada tahap berikutnya

1. *Stratified*: dari populasi diambil secara bertingkat, propinsi ke kabupaten/kota, terus ke kecamatan, dan akhirnya ke SD/MI dan SMP/MTs yang ada di kecamatan
2. Dari wilayah propinsi Sumatera Barat akan diambil 1 daerah kabupaten dan 1 daerah kota, dan dari setiap kabupaten/kota yang terpilih itu diambil masing-masingnya 2 kecamatan. Untuk pengambilan 1 daerah kabupaten dan 1 daerah kota dan 2 kecamatan itu dipakai kriteria tingkat kondisi siswa SD/MI dan SMP/MTs yang putus sekolah tinggi dan rendah.
3. Dengan cara demikian akan diperoleh sampel dengan 2 kabupaten/kota yang meliputi 4 kecamatan dengan tingkat putus sekolah yang tinggi, dan rendah.
4. Dari tiap-tiap kecamatan itu akan diambil tiga SMP/MTs negeri/swasta dengan kriteria tingkat putus sekolah tinggi dan rendah pula. Dengan demikian akan diperoleh 12 SMP/MTs negeri/swasta.
5. Untuk setiap SMP/MTs yang terambil sebagai sampel, akan diikutsertakan sebagai sampel SD/MI yang menjadi *feeders* untuk ke-12 SMP/MTs tersebut. Dengan demikian diperoleh 12 SD/MI negeri/swasta.
6. Sampel siswa putus sekolah akan diambil melalui studi dokumentasi yang ada di SD/MI dan SMP/MTs yang menjadi sampel secara *proportional random sampling*. Masing-masing sekolah baik pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs diambil 3 orang siswa yang putus sekolah. Dengan demikian jumlah sampel dari siswa yang putus sekolah adalah 72 orang.
7. Sampel orangtua mengikuti siswa putus sekolah yang menjadi sampel.

## **C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Instrumen penelitian**

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah angket, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Sebelum diadministrasikan dilakukan uji-coba instrumen (khusus angket untuk siswa) untuk mengetahui reliabilitas dan keterbacaannya dan diperoleh koefisien reliabilitas instrumen sebesar 0,8096. Jika dibandingkan koefisien reliabilitas tersebut dengan koefisien reliabilitas instrumen yang baik, yaitu antara 0,80-an

dan 0,90-an (Hood & Johnson, 1991; Anastasi & Urbina, 1997), maka reliabilitas instrumen tersebut berada pada rentangan koefisien reliabilitas instrumen yang baik.

#### **D. Analisis data**

Data yang telah terkumpul dari berbagai responden akan diolah dengan menggunakan teknik persentase (%) dan dinarasikan atau diolah secara kualitatif.

#### **F. Jadwal Kegiatan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan (September, Oktober dan November 2006). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi rancangan sampel dan urusan administrasi, penyusunan instrumen, pengadministrasian instrumen (pengumpulan data), analisis data, penyusunan draf laporan, seminar/diskusi, dan penyempurnaan laporan akhir.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Jumlah anak Usia Sekolah, APK dan APM SD/MI dan SMP/MTs Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2004/2005 dan 2005/2006**

Jumlah anak usia sekolah di SD/MI (7-12 th) pada tahun 2004/2005 adalah 630.659 orang, dan tahun 2005/2006 sebanyak 643.296 orang. Pada SMP/MTs (13-15th) tahun 2004/2005 adalah 271.466 orang, dan tahun 2005/2006 278.951 orang. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI yang diperoleh pada tahun 2004/2005 adalah 109.37% dan tahun 2005/2006 sebanyak 112.46%. APK SMP/MTs pada tahun 2004/2005 adalah 87.32%, dan tahun 2005/2006 sebanyak 87.61%. . Mencermati jumlah anak usia sekolah di SD/MI (7-12th) dan SMP/MTs (13-15 th), APK dan APM di kedua satuan pendidikan tersebut, menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah pada tahun 2005/2006 dari tahun 2004/2005. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk secara keseluruhan dan meningkatnya daya tampung sekolah untuk anak usia SD/MI dan SMP/MTs dan dibarengi oleh meningkatnya aspirasi anak, orang tua, dan masyarakat terhadap pendidikan. Di samping itu, berbagai upaya juga telah dilakukan oleh pemerintah untuk penuntasan W-9-T misalnya pemberian dana BOS, dana transisi dan retrieval. Adanya program tersebut membantu orang tua (terutama untuk keluarga miskin) dalam meringankan biaya pendidikan anak-anak mereka.

#### **2. Jumlah Lulusan dan Jumlah Anak Putus Sekolah di SD/MI dan SMP/MTs Provinsi Sumatera Barat**

Jumlah lulusan pada SD/MI pada tahun 2004/2005 adalah 78.712 orang dan tahun 2005/2006 sebanyak 81.978 orang. Di SMP/MTs pada tahun 2004/2005 jumlah lulusan adalah 55.625 orang, dan tahun 2005/2006 sebanyak 64.973 orang. Selanjutnya anak putus sekolah di SD/MI pada tahun 2004/2005

adalah 3520 orang, dan tahun 2005/2006 sebanyak 2831 orang. Sedangkan pada SMP/MTs jumlah anak putus sekolah pada tahun 2004/2005 adalah 3853 orang, dan pada tahun 2005/2006 sebanyak 3402 orang. Berkaitan dengan kenaikan jumlah lulusan di SD/MI maupun di SMP/MTs disebabkan oleh meningkatnya jumlah anak usia sekolah dan kemungkinan juga dibarengi oleh terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran/pendidikan. Kondisi anak putus sekolah di SD/MI dan SMP/MTs jumlahnya menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan partisipasi dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Dari gambaran tersebut bisa dikatakan bahwa upaya pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan mencegah anak putus sekolah secara bertahap dapat terealisasi. Dengan kata lain kebijakan pelaksanaan W-9-T di Sumatera Barat mulai membuahkan hasil walaupun secara kuantitatif capaiannya belum signifikan.

### **3. Faktor Internal Anak Putus Sekolah**

Data menunjukkan bahwa anak-anak yang putus sekolah memiliki kemampuan sama dengan teman-teman mereka lainnya. Ini berarti bahwa dari segi kemampuan, anak putus sekolah sebenarnya memiliki potensi yang memadai untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Dengan demikian mereka putus sekolah bukan diakibatkan oleh kemampuan mereka yang rendah, melainkan disebabkan oleh faktor-faktor lain. Dilihat dari minat anak, sebagian dari mereka memiliki minat yang tinggi untuk bersekolah. Artinya, mereka memiliki dorongan yang besar untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini didukung juga oleh jawaban siswa bahwa sebagian besar dari mereka mempunyai persepsi yang positif terhadap pentingnya bersekolah, seperti sekolah itu sangat bermanfaat untuk masa depan. Lagi pula sebagian dari anak-anak putus sekolah memendam harapan yang cukup besar untuk bersekolah lagi.

Gambaran berkenaan dengan aspirasi/cita-cita mereka tentang dunia kerja, ternyata perhatian mereka tertuju pada bidang pekerjaan dan profesi yang tergolong diminati oleh banyak orang seperti; polisi/TNI, dokter, hakim dan insinyur. Menurut pandangan orang tua mengenai perilaku dan cita-cita anak sebagian memiliki perilaku yang baik selama sekolah dan memiliki cita-cita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, meskipun ada sebagian dari mereka yang sering bolos dan nilainya rendah. Hal ini terjadi pada anak-anak yang memang memiliki kemampuan dan minat mereka rendah. Penyebab anak putus sekolah di SD/MI dan SMP/MTs apabila dilihat dari faktor internal tidak begitu signifikan pengaruhnya. Bahkan persepsi dan harapan anak untuk sekolah cukup tinggi.

### **4. Faktor Eksternal Anak Putus Sekolah**

Faktor ekonomi mendominasi terjadinya anak putus sekolah di SD/MI dan SMP/MTs di Sumatera Barat. Hal ini dikuatkan oleh adanya penghasilan orang tua yang pada umumnya (70.00%) rendah yaitu kecil dari Rp. 500.000,- perbulan. Dengan penghasilan sebanyak itu, jelas hanya cukup untuk

memenuhi kebutuhan pokok saja (makan/minum dan pakaian). Hal ini sejalan dengan pendapat siswa bahwa mereka tidak dapat melanjutkan sekolah karena kekurangan biaya untuk memenuhi kebutuhan belajar/sekolahnya. Walaupun ada faktor lainnya, seperti anak jarang masuk sekolah/sering bolos, anak sulit memahami pelajaran di sekolah tetapi persentasenya kecil. Ini mengisyaratkan bahwa anak yang mengalami putus sekolah pada umumnya bukan karena kemampuan berpikirnya rendah tetapi karena ketidak mampuan orang tua untuk membiayai sekolah anaknya.

Lebih dari 71.00% orang tua berpendapat bahwa sekolah itu sangat penting untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Hanya sebagian kecil (rata-rata sekitar 3.00%) orang tua yang mempunyai persepsi sekolah itu tidak penting, seperti kalau sekolah tidak dapat membantu orang tua mencari nafkah, sekolah itu tidaklah penting karena sesudah tamat nantinya juga sulit mencari pekerjaan. Ini mengisyaratkan bahwa apresiasi orang terhadap sekolah dan pendidikan untuk masa depan anaknya cukup tinggi.

#### **5. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Sekolah, dan Masyarakat dalam Pelaksanaan W-9-T**

Upaya yang dilakukan dalam melengkapi sarana dan prasarana sekolah lebih dominan dengan meminta bantuan pemerintah. Sekolah bersama masyarakat (Komite Sekolah) telah berupaya merangkul orang tua siswa untuk ikut membantu sekolah dalam upaya dimaksud. Upaya dalam merangsang para pengusaha, alumni, dan masyarakat pada umumnya telah dilakukan namun masih sangat minim. Upaya dalam mencegah anak putus sekolah juga cukup menggembarakan, di mana anak diberi beasiswa, pembebasan SPP, dan sekolah pun berupaya membebaskan uang masuk bagi anak. Mencari orang tua asuh bagi anak yang terancam putus sekolah juga sudah mulai diupayakan. Bila ditinjau dari segi upaya masyarakat dalam pelaksanaan W-9-T pada dasarnya sudah mulai berkembang, seperti adanya masyarakat yang mewakafkan tanah untuk areal sekolah, dan bergotong royong membangun sekolah baru serta mencari donatur.

### **BAB IV**

## **SIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI**

### **A. Simpulan**

Sejalan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah anak usia sekolah, APK dan APM SD/MI (7-12th) dan SMP/MTs (13-15th) pada tahun 2005/2006 dibanding tahun 2004/2005 sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun-ke tahun. Di samping itu mengisyaratkan meningkatnya kesadaran untuk berpartisipasi sekolah/mengikuti pendidikan khususnya pada usia 7-12th dan 13-15th.

2. Meningkatnya jumlah lulusan di SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2005/2006 dibanding tahun 2004/2005 merupakan konsekuensi logis dari bertambahnya anak usia sekolah pada kedua tingkatan tersebut. Tetapi terjadinya penurunan anak putus sekolah baik di SD/MI maupun di SMP/MTs merupakan dampak dari apresiasi dan upaya orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam rangka menyukseskan W-9-T. Tingginya angka anak putus sekolah di SMP/MTs dibanding SD/MI merupakan isyarat bahwa wajib belajar di SD/MI telah sukses dibanding SMP/MTs.
3. Penyebab anak putus sekolah di SD/MI dan SMP/MTs apabila dilihat dari faktor internal tidak begitu signifikan pengaruhnya. Bahkan persepsi dan harapan anak untuk sekolah cukup tinggi.
4. Faktor yang menyebabkan anak putus sekolah lebih besar (dominan) dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi orang tua karena ternyata penghasilan orang tua pada umumnya di bawah Rp. 500.000,- dengan pekerjaan orang tua anak yang terbanyak adalah sebagai petani/nelayan.
5. Upaya yang dilakukan oleh sekolah bersama masyarakat (komite sekolah) melengkapi sarana dan prasarana sekolah lebih dominan dengan meminta bantuan pemerintah. Upaya untuk merangkul orang tua siswa, pengusaha, alumni dan masyarakat pada umumnya telah dilakukan namun hasilnya yang diperoleh sangat minim. Upaya dalam mencegah anak putus sekolah juga cukup menggembirakan, di mana anak diberi beasiswa, pembebasan SPP, dan sekolah pun berupaya membebaskan uang masuk bagi anak.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah perlu melanjutkan program pemberian bantuan bagi sekolah terutama dalam meringankan beban biaya pendidikan khususnya bagi orang tua yang tidak mampu termasuk peningkatan dari segi besarnya jumlah bantuan yang diberikan. Sekolah seharusnya lebih meningkatkan kegiatan sosialisasinya kepada para orang tua tentang adanya dana yang disiapkan oleh pemerintah untuk membantu keluarga yang tidak mampu membiayai anaknya terutama anak-anak yang terancam putus sekolah. Karena anak putus sekolah lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternalnya, khususnya kondisi ekonomi orang tua.
2. Pemerintah diharapkan selalu menyediakan dana dalam melengkapi sarana dan prasarana sekolah, dan memperbanyak jumlah pemberian beasiswa bagi anak. Sekolah hendaknya memanfaatkan dukungan dana dari pemerintah secara efektif sekaligus merangkul peran masyarakat melalui Komite Sekolah dalam mengantisipasi anak putus sekolah dan pelaksanaan W-9-T. Masyarakat hendaklah menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi dan perkembangan sekolah yang ada di daerahnya.
3. Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota melalui Dinas Pendidikan perlu selalu memutakhirkan data tentang jumlah orang tua yang kurang mampu yang menyebabkan anak putus sekolah. Dengan data yang mutakhir dan benar Pemerintah dapat mengetahui kondisi masyarakat/orang tua yang benar-benar sangat membutuhkan bantuan biaya pendidikan.

### C. Rekomendasi Kebijakan

1. Pemerintah perlu menyempurnakan aturan-aturan yang baku sebagai kendali dan sekaligus sebagai kontrol terhadap pemberian bantuan dana kepada sekolah, agar lebih tepat guna dan tepat sasaran, melalui berbagai media informasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat.
2. Pemerintah perlu membangun sistem kerjasama yang terpadu antara pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan W-9-T seperti peran pemerintahan desa, pemuka masyarakat, dan pengusaha. Dengan demikian, tanggung jawab pelaksanaan pendidikan pada umumnya, dan W-9-T khususnya, tidak hanya tertumpu pada pihak pemerintah (dalam hal ini Dinas Pendidikan) saja.

### KEPUSTAKAAN

Anastasi, A. & Urbina, S. 1997. *Psychological testing*. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.

Arikunto, S. 1986. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Ary, D., Jacobs, L.C., & Razavieh, A. 1982. *Pengantar penelitian pendidikan* (alihbahasa oleh Arief Furchan). Surabaya: Usaha Nasional.

Balitbang Depdiknas. 2003. *Selintas Pendidikan Indonesia di Awal Tahun 2003*. Jakarta: Depdiknas.

Barach, A.B. 1996. *Chaning Technology & Draging Culture*, dalam Brikhman, W. & Lehre, L. *Automotion Education & Human Values*. New York: School Society.

Best, J.W. 1982. *Metodologi penelitian pendidikan* (alihbahasa oleh Sanapiah Fai-sal). Surabaya: Usaha Nasional.

Boediono, Jiyono, Indriyanto, B., dan Swaryani, N. 1999. *Dampak krisis ekonomi terhadap pendidikan dasar. Ringkasan Eksekutif Hasil Studi* (Volume 1). Badan Penelitian dan pengembangan, Departamen Pendidikan dan Kebu-dayaan.

De Young, C.A., dan Wynn, R. 1964. *American Edication*. New York: McGraw-Hill Book Company,

Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat. 2002. *Profil Pendidikan Propinsi Sumatera Barat 2001/2002*.

Elliot, S.N., Kratochwill, T.R., Littlefield, J., & Travers, J.F. 1996. *Educational psychology: Effective teaching, effective learning*. Dubuque: Brown & Benchmark

Hasanuddin, B. 2000. *Diundur Hingga 2009, Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Harian Kompas*. Edisi 3 Maret.

- Hood, A.B. & Johnson, R.W. 1991. *Assessment in counseling: A guide to the use of assessment procedures*. United States America: American Counseling Association.
- Ibrahim. R. 1992. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar. *Mimbar Pendidikan* No. 1 tahun XI April 1992. Bandung: University Press IKIP Bandung.
- Levine, D.U., dan Havighurst, R.J. 1992. *Society and Education*. Nedham Heights, Massachusetts: A Division of Simon & Schuster, Inc.
- Lunenburg, A.C. & Ornstein, A.C. 2000. *Educational Administration*. Belon, CA: Wadworth/Thomson Learning.
- May, M. 1998. Pekerja Anak dan Perencanaan. AisAID
- Nurhadi, M.A., 2000. Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun Bisa Dimajukan. *Harian Kompas*. Edisi 10 Maret.
- Plunket, W.R. & Attner, R.F. 1992. *Introduction to Managemen*. Boston: PWS-Kemp Publishing Company.
- Prayitno. 2000. *Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak*. Padang: Jurusan BK FIP UNP.
- Simanjuntak, P.J. 2000. Pemerintah Tidak Sigap Atasi Pengangguran. *Harian Kompas*. Edisi 26 Februari 2000.
- Syah Nur, A. 2002. *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*. Bandung: Lubuk Agung.
- Syarif, Hidayat. 1994. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemerataan Pendidikan dalam Upaya Memajukan Desa Tertinggal. Makalah: IKIP Bandung.
- Tilaar, H.A.R. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar. H.A.R. 2003. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Tuckman, B.W. 1999. *Conducting educational research*. Sea Harbor Drive, Orlando, FL: Harcourt Brace & Company.
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Tahun 2003.
- Web, L.D. & Norton, M.S. 2000. *Human Resource Administration*. Colombus, Ohio: Merril.
- Zais, R.S. 1976. *Curriculum: Principles & foundations*. New York: Harper & Row.

## ABSTRAK

Anak putus sekolah di Sumatera Barat untuk SD/MI adalah 0.75%, SMP/MTs sebanyak 1.71% (Data Pendidikan Sumatera Barat 2003/2004). Hal ini menunjukkan bahwa anak putus sekolah masih tinggi, khususnya di SMP/MTs. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah anak putus sekolah dalam rangka menyukseskan pelaksanaan W-9-T. Untuk mengungkapkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan W-9-T diajukan beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah penelitian yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini, yaitu; Berapa jumlah anak usia sekolah SD/MI (7-12th) dan SMP/MTs (13-15th), serta APK dan APM pada tahun pelajaran 2004/2005 dan 2005/2006; Berapa jumlah lulusan SD/MI dan SMP/MTs, serta jumlah anak yang putus sekolah pada tahun pelajaran 2004/2005 dan 2005/2006; Bagaimana faktor internal dan faktor eksternal anak putus sekolah; apa saja upaya yang dilakukan pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan W-9-T. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan; jumlah anak usia sekolah SD/MI (7-12th) dan SMP/MTs (13-15th), serta APK dan APM pada tahun pelajaran 2004/2005 dan 2005/2006, jumlah lulusan SD/MI dan SMP/MTs, serta jumlah anak yang putus sekolah pada tahun pelajaran 2004/2005 dan 2005/2006; faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan anak putus sekolah; upaya yang dilakukan pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan W-9-T dan memberikan rekomendasi kebijakan agar pelaksanaan W-9-T mencapai sasaran.

Penelitian ini adalah penelitian jenis survei, populasi penelitian adalah jumlah anak usia SD/MI, SMP/MTs, siswa putus sekolah, pimpinan Depdiknas (provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan) kepala sekolah, komite sekolah, orang tua siswa putus sekolah dan dewan pendidikan Kabupaten dan Kota. Sampel diambil dengan teknik *stratified proportional sampling* pada tahap awal dan *proportional random sampling* pada tahap berikutnya. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah angket, pedoman wawancara dan format isian. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan teknik persentase (%).

Hasil penelitian menunjukkan; jumlah anak usia sekolah, APK dan APM di SD/MI dan SMP/MTs pada tahun pelajaran 2005/2006 meningkat dari tahun sebelumnya; jumlah lulusannya juga meningkat. Terjadi penurunan jumlah anak putus sekolah di SD/MI dan SMP/MTs pada tahun pelajaran 2005/2006, tetapi jumlah anak putus sekolah di tingkat SMP/MTs lebih besar dibanding SD/MI. Faktor eksternal merupakan faktor yang dominan menyebabkan anak putus sekolah, khususnya kondisi ekonomi keluarga. Upaya yang dilakukan untuk mencegah anak putus sekolah adalah; pemberian beasiswa, pembebasan SPP. Upaya lain adalah pembebasan uang pendaftaran dan mencari orang tua asuh.

Direkomendasikan kepada pemerintah agar menyempurnakan aturan-aturan yang berlaku sebagai kendali dan kontrol pemberian bantuan serta perlu membangun jaringan kerjasama yang terpadu antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan W-9-T. Sehingga tanggung jawab pendidikan tidak bertumpu pada pihak pemerintah saja.

## PENGANTAR

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja dengan instansi terkait.

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional dengan surat perjanjian kerja Nomor : 7019-17/G1/LK/2006 Tanggal 14 Agustus 2006, dengan judul Kegiatan Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Sumatera Barat.

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai masalah pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang telah dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan.

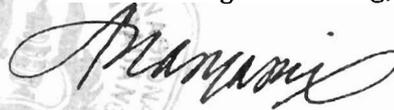
Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan kualitas staf akademik Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional yang telah memberikan dana untuk pelaksanaan penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Padang, November 2006

Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Negeri Padang,



Prof. Dr. H. Anas Yasin, M.A.  
NIP. 130365634

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN IDENTITAS .....	ii
EXECUTIVE SUMMARY .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Hasil yang Diharapkan .....	6
E. Ruang Lingkup .....	7
II. KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL .....	8
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian .....	14
B. Subjek Penelitian .....	15
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	17
D. Analisis Data .....	20
E. Jadwal Kegiatan .....	21
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian .....	22
B. Pembahasan .....	31
V. SIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	
A. Simpulan .....	36
B. Saran .....	37
C. Rekomendasi Kebijakan .....	38
KEPUSTAKAAN .....	39
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel:

1. Rekapitulasi Jenis Data, Responden, Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahannya	20
2. Jadwal Kegiatan Penelitian	21
3. Jumlah Anak Usia Sekolah, APK dan APM di Provinsi Sumatera Barat	22
4. Jumlah Lulusan dan Jumlah Anak Putus Sekolah di Provinsi Sumatera Barat	23
5. Faktor Internal Anak Putus Sekolah	24
6. Faktor Eksternal Anak Putus Sekolah	26
7. Upaya yang Dilakukan dalam Melengkapi Sarana dan Prasarana	28
8. Bantuan yang Diberikan dalam Mencegah Anak Putus Sekolah	29
9. Upaya Masyarakat dalam Pelaksanaan W-9-T	30

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram:

- |                            |    |
|----------------------------|----|
| 1. Kerangka Berfikir       | 13 |
| 2. Pola Pengambilan Sampel | 16 |

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

1. Curikulum Vitae Tim Peneliti
2. Surat Izin Penelitian
3. Instrumen Penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wajib belajar (Wajar) merupakan kebijakan pemerintah RI yang sangat mendasar dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global dan perdagangan bebas. Memahami pentingnya peranan pendidikan, khususnya Wajar, dalam kehidupan bermasyarakat muncullah konsep pengembangan sumber daya manusia (*human resources development*) yang dianggap sangat penting di samping adanya sumber-sumber daya alam (*natural resources*) (Tilaar, 2000). Kenyataan menunjukkan bahwa banyak negara yang miskin akan sumber-sumber daya alam tetapi dapat lebih maju karena kemampuan sumber daya manusianya.

Permasalahan sumber daya yang terdidik sudah lama menjadi perhatian pemerintah Indonesia yang diamanatkan dalam UUD45 pasal 31 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; dan ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Pernyataan ini lebih ditegaskan lagi dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 20 tahun 2003 antara lain disebutkan: Pertama, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (pasal 5 ayat (1). Kedua, “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar” (pasal 6 ayat (1). Ketiga, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemampuan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi” (pasal 11 ayat (1). Keempat, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun” (pasal 11 ayat (2).

Tingkat pendidikan yang rendah tidak dapat membawa manusia kepada kehidupan yang layak. Berkaitan dengan itu, lahirlah gerakan dunia yang disebut

*education for all* yaitu pendidikan merupakan suatu kebutuhan pokok (*basic need*) dalam kehidupan manusia (Tilaar, 2000). Didorong oleh prinsip ini maka maraklah program wajib belajar, menjadi target pengembangan sumber daya manusia yang sangat penting.

Pelaksanaan Wajar di Indonesia dimulai dengan wajib belajar sekolah dasar 6 tahun (Wajar 6 Tahun), dan itu telah dicapai pada tahun 1984 dengan mendapat penghargaan *Aviciena* dari UNESCO (Tilaar, 2000). Kesuksesan Wajar 6 Tahun (W-6-T) dilanjutkan dengan pelaksanaan Wajar 9 Tahun (W-9-T) atau wajib belajar sekolah lanjutan tingkat pertama. Pelaksanaan W-9-T dimulai tahun 1994, ketika Wardiman Djojonegoro menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagaimana dijelaskan di muka, dasar diadakannya program ini karena tuntutan peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang tergolong rendah dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Sebagai perbandingan, hasil survei *The Political and Economic Risk Consultancy* menyimpulkan bahwa sistem pendidikan Indonesia berada di urutan ke-12 di Asia, setelah Vietnam, dengan urutan pertama dan kedua adalah Korea Selatan dan Singapura. Hasil survei yang didasarkan pada mutu tenaga kerja ini menunjukkan bahwa rendahnya mutu tenaga kerja berhubungan dengan rendahnya mutu sistem pendidikan (Malik Fajar, dalam Syah Nur, 2002).

Program tersebut semakin terasa kebutuhannya dalam menghadapi berbagai tantangan sehubungan dengan telah masuknya era perdagangan bebas semenjak tahun 2003. Dalam pelaksanaannya, W-9-T tidak sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Partisipasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang melahirkan wajib belajar merupakan perwujudan dari hak asasi manusia (Tilaar, 2002). Masyarakat harus lebih diberdayakan agar mereka ikut mengurus manajemen pendidikan yang pada akhirnya masyarakat berperan aktif dalam pembiayaan pendidikan. Untuk itu dibentuk Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan (SK Mendiknas No.049/U/2002)

Penyelesaian penuntasan W-9-T pada awalnya ditetapkan pada tahun 2004. Namun karena adanya krisis ekonomi sejak tahun 1998 yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin, dan karena keterbatasan keuangan negara, maka penuntasan W-9-T diundur menjadi tahun 2009. Akibat krisis ekonomi itu jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah dari 22 juta pada tahun 1997 menjadi 40 juta jiwa pada tahun 1998. Dampak dari krisis ekonomi tersebut para orangtua murid banyak yang tidak mampu menyekolahkan anak di Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) (Hasanuddin, 2000).

Lebih lanjut Hasanuddin menjelaskan pada tahun 2000 anak usia sekolah (7-15 tahun) dari keluarga miskin mencapai 7,2 juta. Mereka merupakan sasaran W-9-T yang memerlukan bantuan biaya belajar atau beasiswa agar tetap bisa meneruskan sekolah di SD/MI hingga SMP/MTs. Berkat bantuan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) bidang pendidikan mulai tahun 1998, sekitar 3,5 juta di antaranya mendapat beasiswa hingga tetap bersekolah di SD/MI dan SMP/MTs. Di samping itu, beasiswa dari lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) mampu membantu sekitar satu juta anak. Dengan demikian masih terdapat sekitar 2,5 juta anak dari keluarga miskin yang belum mendapat beasiswa. Pada Juli-Desember 2000 pemerintah kembali memberikan beasiswa JPS pendidikan kepada 4 juta siswa SD-SLTA swasta dan negeri. Jumlah dana yang diberikan sebanyak Rp.379 milyar. Sedangkan untuk Dana Bantuan Operasional (DBO) pemerintah mengeluarkan dana sebanyak Rp.188 milyar. Dengan demikian jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk ke-suksesan W-9-T sekitar Rp.567 milyar. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan dana yang cukup banyak untuk kesuksesan W-9-T, dana tersebut hanya mampu untuk menahan atau menyelamatkan anak supaya tidak *drop out* (putus sekolah), bukan menambah jumlah anak yang bisa bersekolah.

Sehubungan dengan jumlah anak putus sekolah tersebut, apabila dilihat berdasarkan daerah, angka putus sekolah lebih banyak di daerah pinggiran (Levine dan Havighurst, 1992). Angka putus sekolah di daerah pedesaan hampir

dua kali lipat dibandingkan dengan daerah semi perkotaan (Boediono, Jiyono, Indriyanto, dan Swaryani, 1999). Sehubungan dengan itu, di Provinsi Sumatera Barat persentase anak putus sekolah untuk SD/MI adalah 0.75 %, SMP/MTs adalah 1.71% (Data Pendidikan Sumatera Barat 2003/2004). Hal ini menunjukkan bahwa angka putus sekolah di tingkat SMP/Mts lebih besar setelah SD/MI. Artinya banyak anak usia sekolah 13-15 tahun yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke tingkat SLTP. Perhitungan kuantitatif di atas memberi makna bahwa pembangunan pendidikan dasar di Sumatera Barat belum mencapai target yang diharapkan.

## **B. Perumusan Masalah**

Ada lima variabel yang berhubungan dengan keberhasilan siswa dalam belajar di sekolah, yaitu (1) karakteristik siswa, (2) karakteristik guru, (3) kondisi sekolah/daerah, (4) kondisi kelas, dan (5) performansi pengajaran guru (Centra dan Potter, dalam Elliot, Kratochwill, Littlefield & Travers, 1996). Aspek karakteristik siswa meliputi latar belakang klas sosial dan motivasi, persepsi, ekspektasi, dan pengaruh orangtua. Aspek karakteristik guru meliputi nilai-nilai dan sikap, kelas sosial, pengalaman, dan sebagainya. Variabel kondisi sekolah/daerah meliputi ukuran sekolah, letak sekolah (termasuk jarak sekolah dari rumah), sumber keuangan, layanan staf yang profesional; pada aspek kondisi sekolah meliputi: organisasi administrasi, organisasi pengajaran, pengaruh teman sebaya, dan lingkungan/suasana sekolah/kelas. Aspek performansi pengajaran seperti metode mengajar guru, penge-lolaan kelas, dan hubungan guru murid.

Kelima variabel di atas bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal (dalam diri) dan faktor eksternal (luar diri) siswa. Aspek internal meliputi kemampuan, minat, motivasi, nilai-nilai dan sikap, ekspektasi (harapan), dan persepsi siswa tentang sekolah. Pada aspek eksternal meliputi latar belakang ekonomi orangtua, persepsi orangtua tentang pendidikan, jarak sekolah dari rumah, hubungan guru-murid, usaha yang dilakukan pemerintah (meliputi pemberian bantuan dan pengadaan sarana dan prasarana).

Banyaknya siswa-siswa yang tidak berhasil dalam belajar, termasuk banyak-nya anak-anak putus sekolah bisa dilihat dari kedua aspek tersebut. Berdasarkan penjelasan rumusan masalah di atas, dirumuskan permasalahan penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Berapa jumlah anak usia SD/MI dan SMP/MTs, serta angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM) ?
2. Berapa jumlah lulusan SD/MI dan SMP/MTs, jumlah dan sebaran anak putus sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs?
3. Bagaimana faktor internal anak-anak yang putus sekolah?
4. Bagaimana faktor eksternal anak-anak yang putus sekolah?
5. Upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam pelaksanaan W-9-T?
6. Berdasarkan jawaban pertanyaan tersebut diberikan rekomendasi bagaimana pola pelaksanaan Wajar 9 tahun agar mencapai sasaran yang diinginkan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan:

1. Jumlah anak usia SD/MI dan SMP/MTs, serta angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM) di Sumatera Barat.
2. Jumlah lulusan SD/MI dan SMP/MTs, jumlah dan sebaran anak putus sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Sumatera Barat.
3. Faktor internal anak-anak yang putus sekolah.
4. Faktor eksternal anak-anak yang putus sekolah.
5. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam pelaksanaan W-9-T.
6. Rekomendasi tentang pola pelaksanaan W-9-T agar mencapai sasaran yang diinginkan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut;

1. Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan untuk pertimbangan bagi orang tua, kepala sekolah, dan komite sekolah dalam menyikapi program wajib belajar, khususnya untuk keperluan mengantisipasi anak putus sekolah.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan dibidang pendidikan dalam mengambil keputusan yang tepat berkaitan dengan kesuksesan wajib belajar 9 tahun.

#### **D. Hasil yang Diharapkan**

Hasil yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Data jumlah anak usia SD/MI dan SMP/MTs serta APK dan APM SD/MI dan SMP/MTs
2. Data jumlah lulusan SD/MI dan SMP/MTs dan anak putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs
3. Data tentang faktor internal yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan W-9-T, baik yang menyangkut siswa yang bersangkutan, orang tua, masyarakat, pimpinan Diknas, pimpinan sekolah dan guru yang memiliki siswa putus sekolah.
4. Data faktor eksternal yang berupa sarana, prasarana, dan fasilitas lainnya yang menjadi sumber hambatan pelaksanaan W-9-T.
5. Data tentang berbagai upaya yang telah dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan W-9-T, seperti pihak Diknas, Sekolah, Orangtua dan masyarakat.
6. Kebijakan yang bisa direkomendasikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan W-9-T agar program tersebut mencapai sasaran pada tahun 2009.

## **E. Ruang Lingkup**

Lingkup kegiatan penelitian ini mencakup lima hal, yaitu :

1. Mendeskripsikan jumlah anak usia SD/MI dan SMP/MTs dan APK SD/MI dan SMP/MTs
2. Mengungkapkan jumlah Lulusan SD/MI dan SMP/MTs dan anak putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs
3. Mengungkapkan berbagai faktor internal yang menyebabkan kurang efektifnya wajar sembilan tahun, seperti peran orang tua; peran pimpinan Diknas, peran pimpinan sekolah dan guru dalam proses pembelajaran. Di samping itu juga aspirasi pendidikan yang berasal dari siswa yang bersangkutan. Usaha apa saja yang telah dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait dalam mengatasi berbagai kendala yang ditemui dalam pelaksanaan wajar sembilan tahun.
4. Mengungkapkan faktor eksternal apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan wajar sembilan tahun, seperti kondisi ekonomi orang tua/masyarakat, sarana dan prasarana yang tersedia, peraturan perundang-undangan apakah dipahami oleh semua pihak terkait atau belum, faktor sosial budaya masyarakat setempat yang dapat mempengaruhi kurang efektifnya pelaksanaan Wajar sembilan tahun.
5. Dari hasil pengungkapan faktor internal maupun faktor eksternal yang menjadi kendala pelaksanaan Wajar sembilan tahun itu, selanjutnya dilakukan penelaahan atau pembahasan mengapa semuanya itu menjadi faktor penghambat tercapainya pelaksanaan W-9-T di Sumatera Barat. Dari hasil temuan penelitian dan pembahasan tersebut lahirlah beberapa kesimpulan dan rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan Wajar sembilan tahun dan usaha menanggulangnya atau mengatasi kendala yang ada demi suksesnya kebijakan tersebut.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

#### A. Kebijakan

Pada bangsa-bangsa yang telah maju Wajar telah mulai sejak lama. Di Amerika Serikat misalnya, wajar telah dimulai sejak tahun 1852 (De Young & Wynn, 1964). Wajib belajar ini dimulai dengan wajib belajar di sekolah dasar, dan terus berkembang sampai umur anak mencapai 18 tahun. Wajib belajar ini dikenakan kepada anak pada umur-umur yang dimaksudkan itu, dan pertanggungjawabannya diletakkan pada orang tua, termasuk di dalamnya para wali atau orang tua asuh anak yang bersangkutan (Brishen, 1970).

Sejak awal 1970-an pendidikan memang sudah mejadi prioritas kebijakan pemerintah Indonesia. Pada tahun 1973 berdasarkan Inpres Nomor 10 pemerintah secara terencana meningkatkan pembangunan sarana pendidikan dasar. Tahun 1983 dimulai program wajib belajar 6 tahun untuk anak usia 7 – 12 tahun secara nasional. Sukses yang dicapai dengan program wajib belajar 6 tahun ini memotivasi pemeritah untuk meningkatkan program wajib belajar menjadi 9 tahun sejak bulan Mei tahun 1994 yang lalu. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijaksanaan pendidikan dasar 9 tahun sampai dengan tingkat SLTP/satuan pendidikan sederajat adalah wajib belajar bagi semua warga negara. Timbulnya kebijakan tersebut karena berbagai kondisi yang terjadi di lapangan, seperti; (1) lebih dari 80% angkatan kerja hanya berpendidikan SD atau kurang, atau SMP tidak tamat, (2) program wajib belajar 9 tahun akan meningkatkan kualitas SDM dan dapat memberi nilai tambah pula pada pertumbuhan ekonomi, (3) semakin tinggi pendidikan akan semakin besar partisipasi dan kontribusinya di sektor-sektor yang produktif, (4) dengan peningkatan program wajib belajar dari 6 ke 9 tahun akan meningkatkan kematangan dan keterampilan siswa, 5) peningkatan

wajib belajar 9 tahun akan meningkatkan umur kerja minimum dari 10 sampai 15 tahun (Syarif, 1994).

Pada mulanya kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini diharapkan bisa tuntas pada tahun 2004. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia lebih siap memasuki pasar global, baik pasar bebas AFTA, maupun APEC, tetapi kemudian diundur menjadi tahun 2008 dengan alasan karena krisis ekonomi dan krisis lainnya yang terjadi sejak 1997 (Balitbang Diknas, 2003). Krisis tersebut berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin dan keterbatasan keuangan Negara, serta kemampuan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Alasan lainnya adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orangtua terhadap pendidikan sejauh ini belum terlaksana sebagaimana mestinya dan belum maksimalnya kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi yang diberikan pusat.

Gerakan Wajar mendapatkan pijakan yang lebih kuat lagi pada UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional yang baru, yaitu yang pasal dan ayatnya telah dikemukakan pada Halaman 1. Penekanan yang lebih dirasakan tampak pada tanggung jawab pembiayaan wajib belajar itu sendiri dan penyelenggaraannya, yaitu pemerintah pusat dan daerah. Mudah-mudahan peningkatan Wajar ini dapat mengejar ketertinggalan pelaksanaan Wajar dari bangsa yang telah maju itu.

## **B. Tujuan Wajib Belajar**

Program wajib belajar 9 tahun didasari konsep “pendidikan dasar untuk semua” (*universal basic education*), yang pada hakekatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk semua anak. Hal ini sesuai dengan kaedah-kaedah yang tercantum dalam Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia (HAM), tentang Hak Anak, dan tentang Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak (Prayitno, 2000). Melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun diharapkan dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang perlu dimiliki semua warga negara sebagai bekal untuk dapat hidup dengan layak di masyarakat

dan dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi baik ke lembaga pendidikan sekolah ataupun luar sekolah. Dengan wajib belajar, mereka akan dapat menjalani hidup dan menghadapi kehidupan dalam masyarakat. Di samping itu, menurut May, (1998) adalah merangsang aspirasi pendidikan orangtua dan anak yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja penduduk secara nasional. Untuk itu, target penyelenggaraan W-9-T bukan semata-mata sekedar untuk mencapai target angka partisipasi secara maksimal, namun perhatian yang sama ditujukan juga untuk memperbaiki kualitas pendidikan dasar yang sekarang ini masih jauh dari standar nasional.

Agar sasaran tersebut terwujud secara optimal perlu diupayakan adanya kesinambungan penyelenggaraan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan sederajat berkenaan dengan berbagai komponen pendidikan yang mendukung.

### **C. Pelaksanaan Wajib Belajar**

Pelaksanaan program W-9-T di Indonesia memiliki empat ciri utama, yaitu (1) dilakukan tidak melalui paksaan tetapi bersifat himbauan, (2) tidak memiliki sanksi hukum tetapi menekankan tanggung jawab moral dari orang tua untuk menye-kolahkan anaknya, (3) tidak memiliki undang-undang khusus dalam implementasi program, (4) keberhasilan dan kegagalan program diukur dari peningkatan partisipasi bersekolah anak usia 6 - 15 tahun. Menurut Ibrahim (1992) pelaksanaan W-9-T dilakukan melalui jalur sekolah maupun luar sekolah. Melalui jalur sekolah meliputi program 6 tahun di SD dan program 3 tahun di SLTP. Untuk tingkat SD diberlakukan pada SD regular, SD Kecil, SD Pamong, SD terpadu, MI, Pondok Pesantren, SDLT, dan kelompok belajar Paket A. Sedangkan untuk tingkatan SLTP dilaksanakan SLTP Reguler, SLTP Kecil, SLTP Terbuka dan SLTP-LB dan kelompok belajar Paket B.

Pada tahun 2000 adalah mulai diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pemerintahan di daerah, termasuk pengelolaan pendidikan (PP No.25

tahun 2000). Dengan kebijakan otonomi daerah ini terbuka kesempatan bagi para ahli, praktisi, dan pengamat pendidikan untuk bersama-sama memberdayakan pendidikan secara menyeluruh, termasuk W-9-T. Otonomi pendidikan merupakan salah satu kesempatan yang sangat baik bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah masing-masing yang merupakan tolok ukur kualitas sumber daya manusia. Ada keberagaman daerah dalam menyikapi diberlakukannya otonomi pendidikan. Di satu pihak ada daerah yang optimis, dan di pihak lain ada yang pesimis. Daerah yang merasa pesimis disebabkan oleh realitas kondisi daerahnya, khususnya kemampuan masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang berbeda-beda (Suyanto, 2001). Di samping itu muncul pula “kepanikan” bagi daerah dalam menyediakan dana alokasi umum (DAU) untuk menggaji guru dan pegawai yang didaerahkan. Di lain pihak, daerah yang optimis, yaitu daerah yang mampu membuat rencana anggaran untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di daerahnya.

Sehubungan dengan itu, apapun sikap daerah segala kendala yang muncul dalam penyelenggaraan W-9-T harus ditangani secara otonom oleh daerah masing-masing. Diyakini atau tidak, pendidikan dasar 9 tahun merupakan wahana yang paling efektif untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia pada umumnya.

Bagaimanapun berat dan sulitnya permasalahan yang ada pada awalnya, dengan adanya kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan akan dapat dikelola dengan lebih murah dan lebih cepat. Desentralisasi pendidikan dapat mengembangkan kreativitas siswa, guru, kepala sekolah, dan masyarakat. Untuk itu perlu diberlakukan manajemen berbasis sekolah (*school based management*) dengan tujuan agar sekolah dapat mengelola proses belajar mengajar dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan pembelajaran siswa. Artinya, manajemen berbasis sekolah harus mampu melaksanakan perbaikan proses belajar mengajar di kelas (*classroom change*) agar membuahakan pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat bagi kehidupan siswa (Zais, 1976).

Kemampuan pengelolaan di tingkat daerah (Daerah Tk.II dan tingkat-tingkat yang lebih rendah sampai dengan tingkat satuan pendidikan), sangatlah menentukan. Dua dimensi yang paling esensial dalam kepemimpinan sebagai aspek pokok pengelolaan, adalah dimensi pelaksanaan tugas (*task dimension*) dan dimensi keterampilan membina hubungan (*relation skill dimension*) (Lunenburg & Ornstein, 2000). Oleh karena itu penempatan tenaga yang benar-benar berkemampuan merupakan keharusan (Webb & Norton, 2000). Hal ini tentulah tidak berarti unsur-unsur lain menjadi kurang penting, karena manajemen, dalam hal ini manajemen sekolah, adalah proses untuk menetapkan dan mencapai tujuan sekolah melalui fungsi-fungsi manajemen dengan memanfaatkan sumber-sumber orang, uang (dana) atau materi (Plunket & Attner, 1992) ditambah lagi dengan mesin, waktu, dan teknologi (Barrach, 1986).

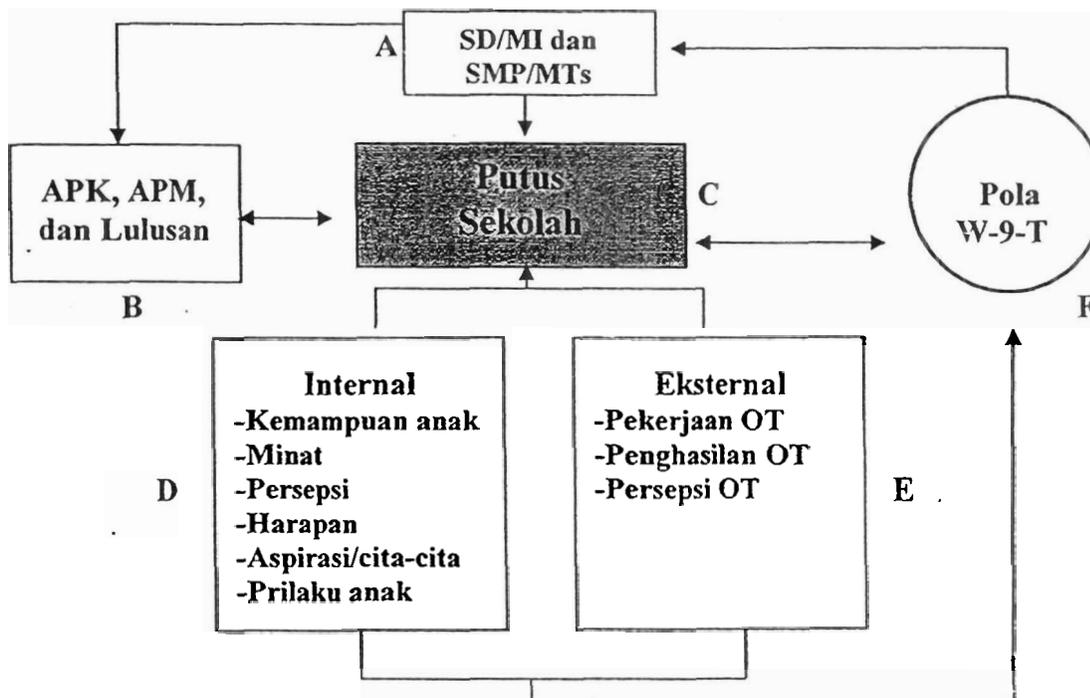
#### **D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi**

Faktor internal dari diri siswa merupakan faktor utama dan kunci keberhasilan pelaksanaan W-9-T. Di samping itu juga faktor eksternal, seperti yang dikemukakan oleh Ibrahim (1992) dan Syarif (1994) yang meliputi upaya (1) peningkatan jumlah daya tampung yang perlu didahului oleh pendataan dan pemetaan sekolah, (2) penyediaan sarana yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya, (3) pengajuan anggaran yang lebih besar untuk anggaran pendidikan, termasuk pemberian bantuan kepada orang tua yang kurang mampu melalui pemberian beasiswa, keringanan atau pembebasan uang sekolah, (4) peningkatan program orang tua asuh, penyuluhan dan publikasi kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan dalam rangka mencapai hidup dan kehidupan yang layak dan lebih baik di masa depan, dan (5) penetapan kebijakan yang bersinergik oleh berbagai kalangan yang bertanggung jawab.

Faktor lainnya yang sangat penting yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan W-9-T adalah pengembangan sistem pendidikan alternative. Strategi dengan menciptakan pendidikan alternative ini didasari oleh adanya pertimbangan bahwa meskipun kapasitas sekolah sudah ditingkatkan,

masih banyak anak usia sekolah yang belum tertampung, antara lain karena kondisi kemiskinan dan tidak mampu membiayai sekolah.

Dari uraian di atas digambarkan kerangka berfikir seperti di bawah ini:



**Diagram 1: Kerangka Berfikir**

**Keterangan:**

1. SD/MI dan SMP/MTs (A) merupakan lembaga pendidikan penyelenggara W-9-T yang menampung anak-anak yang dikenai Wajar
2. Pada SD/MI dan SMP/MTs dididik sejumlah anak dengan APK dan APM tertentu (B) dalam kaitannya dengan anak usia SD/MI (7-12 tahun) dan SMP/MTs (13-15 tahun), serta lulusannya
3. Dari SD/MI dan SMP/MTs tersebut dapat diketahui pula jumlah anak putus sekolah (C)
4. Dari anak putus sekolah akan diungkapkan faktor-faktor internal (D) dan eksternal (E) yang mempengaruhi kondisi putus sekolah mereka.
5. Dari faktor-faktor internal dan eksternal tersebut akan dirumuskan pola pelaksanaan W-9-T (F) yang selanjutnya diterapkan terhadap SD/MI dan SMP/MTs penyelenggaraan Wajar (A) dan terhadap anak-anak yang putus sekolah (C).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan jenis penelitian, subjek penelitian, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif jenis survei. Adapun subjek yang disurvei yaitu jumlah anak yang mengikuti W-9-T dan mereka yang lulus dan putus sekolah, faktor internal dan eksternal yang menyebabkan anak putus sekolah, upaya yang dilakukan pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat serta pelaksanaan W-9-T pada umumnya. Rancangan penelitian termasuk penelitian deskriptif-analitik. Maksudnya penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena apa adanya, kemudian fenomena tersebut dianalisis untuk mendapatkan makna yang sesungguhnya (Ary, Jacobs & Razavieh, 1982; Best, 1982). Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut;

**Tahap 1:** Penginventarisasian daerah-daerah pelaksana W-9-T dan dilanjutkan penjajakan awal ke lapangan dalam rangka penarikan sampel penelitian, serta pengurusan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan penyempurnaan melalui uji coba instrumentasi yang akan digunakan untuk mengumpulkan data

**Tahap 2:** Pengumpulan data kelengkapan serta verifikasi data yang telah diperoleh. Data yang belum lengkap diusahakan untuk melengkapinya dengan terjun ke lapangan lagi sehingga data yang diharapkan dapat terkumpul semuanya.

**Tahap 3:** Pengolahan data dengan menggunakan program komputer SPSS, hasilnya kemudian ditafsirkan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

**Tahap 4:** Penyusunan draf laporan berdasarkan hasil pengolahan data.

**Tahap 5:** Diskusi untuk menyusun draf final laporan penelitian dengan memperhatikan berbagai masukan dari berbagai sumber untuk melengkapi data dan penafsirannya serta pola laporan, *terms of reference* penelitian

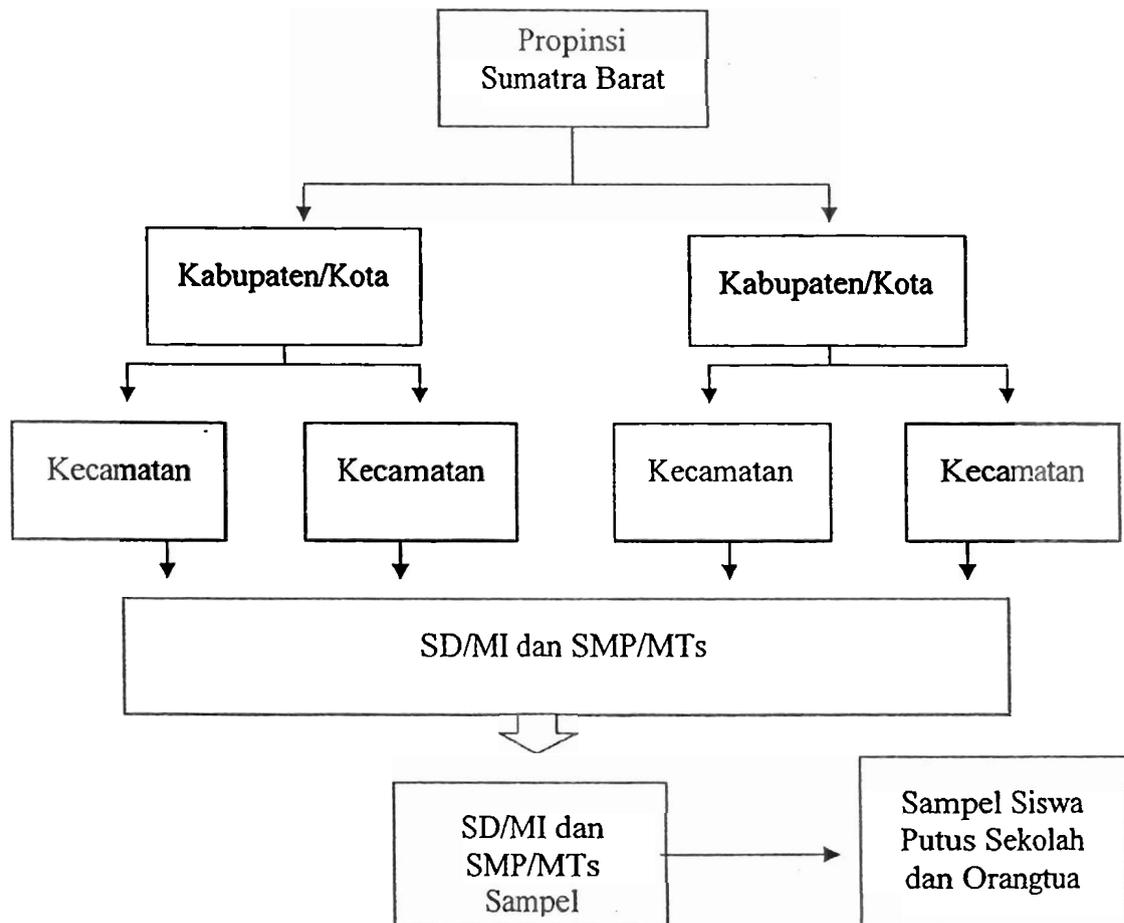
## **B. Subyek Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Sekolah, Dinas Pendidikan (provinsi, kab/kota dan kecamatan), siswa putus sekolah, orang tua, Komite Sekolah, dan Dewan Pendidikan (provinsi, kab/kota) di Sumatera Barat. Jenjang pendidikan meliputi SD/MI dan SMP/MTs yang melaksanakan W-9-T. Adapun wilayah yang akan diteliti adalah Daerah Kab/Kota dan Kecamatan dalam Provinsi Sumatera Barat. Populasi penelitian meliputi jumlah anak usia SD/MI dan SMP/Mts, siswa SD/MI dan SMP/MTs negeri dan swasta, serta mereka yang putus sekolah, orang tua dari siswa yang putus sekolah tersebut, pimpinan Depdiknas (provinsi, kab/kota dan kecamatan), Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Jumlah SD/ MI dan SMP/MTs se Sumatera Barat.

Berhubung jumlah populasi sangat besar, maka perlu dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *Multy Stage* dengan cara sebagai berikut:

1. Untuk menentukan daerah atau wilayah penelitian digunakan teknik *areal sampling*. Dengan pertimbangan ada yang mewakili daerah Kota dan daerah Kabupaten, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam daerah-daerah kecamatan.
2. Penentuan sekolah yang diambil sebagai sampel digunakan teknik *stratified random sampling*. Stratanya mengikuti jenjang sekolah (SD/MI dan SMP/MTs).
3. Sampel siswa putus sekolah dan orangtuanya, diambil dengan menggunakan teknik *proporsional random sampling* terhadap jumlah siswa putus sekolah.

Gambaran menyeluruh populasi dan sampel penelitian ini terpola pada diagram berikut:



**Diagram 2. Pola Pengambilan Sampel**

**Catatan:**

Sampel diambil dengan teknik *stratified proportional sampling* pada tahap awal, dan *proportional random sampling* pada tahap berikutnya

1. *Stratified*: dari populasi diambil secara bertingkat, propinsi ke kabupaten/kota, terus ke kecamatan, dan akhirnya ke SD/MI dan SMP/MTs yang ada di kecamatan

2. Dari wilayah propinsi Sumatera Barat akan diambil 1 daerah kabupaten dan 1 daerah kota, dan dari setiap kabupaten/kota yang terpilih itu diambil masing-masingnya 2 kecamatan. Untuk pengambilan 1 daerah kabupaten dan 1 daerah kota dan 2 kecamatan itu dipakai kriteria tingkat kondisi siswa SD/MI dan SMP/MTs yang putus sekolah tinggi dan rendah.
3. Dengan cara demikian akan diperoleh sampel dengan 2 kabupaten/kota yang meliputi 4 kecamatan dengan tingkat putus sekolah yang tinggi, dan rendah.
4. Dari tiap-tiap kecamatan itu akan diambil tiga SMP/MTs negeri/swasta dengan kriteria tingkat putus sekolah tinggi dan rendah pula. Dengan demikian akan diperoleh 12 SMP/MTs negeri/swasta.
5. Untuk setiap SMP/MTs yang terambil sebagai sampel, akan diikutsertakan sebagai sampel SD/MI yang menjadi *feeders* untuk ke-12 SMP/MTs tersebut. Dengan demikian diperoleh 12 SD/MI negeri/swasta.
6. Sampel siswa putus sekolah akan diambil melalui studi dokumentasi yang ada di SD/MI dan SMP/MTs yang menjadi sampel secara *proportional random sampling*. Masing-masing sekolah baik pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs diambil 3 orang siswa yang putus sekolah. Dengan demikian jumlah sampel dari siswa yang putus sekolah adalah 72 orang.
7. Sampel orangtua mengikuti siswa putus sekolah yang menjadi sampel.

### C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Instrumen penelitian

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah angket, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Angket digunakan untuk mengukur kondisi internal siswa, sedangkan pedoman wawancara digunakan untuk mengungkapkan kondisi eksternal siswa putus sekolah. Di samping itu, pedoman wawancara juga digunakan untuk mengetahui pendapat pimpinan Diknas tentang kebijakan dan kendala-kendala yang ditemui dalam melaksanakan Wajib Belajar Sembilan Tahun, serta kepada Pimpinan Sekolah

untuk mengungkapkan sebab-sebab yang menimbulkan anak putus sekolah, serta usaha apa saja yang telah dilakukan pimpinan sekolah untuk menghindari terjadinya anak putus sekolah. Analisis dokumentasi digunakan untuk mengetahui jumlah anak usia SD/MI dan SMP/MTs, besarnya APK, jumlah lulusan dan putus sekolah, serta kebijakan pelaksanaan W-9-T.

Teknik wawancara dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dari orang tua siswa maupun siswa itu sendiri, mengenai berbagai masalah yang dihadapi sehingga anaknya putus sekolah dan juga bagaimana pendapat si anak mengapa ia tidak lagi mau melanjutkan sekolahnya ataukah saat ini ia juga masih ada kemauan atau ingin sekolah lagi, dan kegiatan mereka sekarang. Kalau si anak masih ingin melanjutkan sekolah lagi lalu faktor apa yang menyebabkan ia tidak bisa sekolah. Di samping itu wawancara dan observasi juga dipakai untuk mengumpulkan informasi dari tokoh-tokoh masyarakat (*key person*) mengenai faktor penyebab anak putus sekolah yang ada didaerahnya itu. Kendala apa yang ditemui oleh masyarakat setempat untuk mengurangi terjadinya anak putus sekolah dan usaha apa saja yang selama ini telah dilakukan oleh masyarakat di daerah itu untuk menanggulangi meningkatnya anak putus sekolah.

Sebelum diadministrasikan dilakukan uji-coba instrumen (khusus angket untuk siswa) untuk mengetahui reliabilitas dan keterbacaannya. Untuk kepentingan tersebut, instrument diuji-cobakan kepada sekelompok siswa yang ada di kota Padang. Dalam uji-coba instrumen, peneliti secara langsung mengadministrasikan kuesioner kepada kelompok coba. Dengan demikian peneliti dapat mengamati dan mencatat berbagai pertanyaan/pernyataan siswa tentang instrumen. Pertanyaan/ pernyataan responden tersebut dijadikan bahan pertimbangan dalam merevisi atau menyempurnakan instrumen penelitian. Dalam uji-coba ini, responden membaca sendiri petunjuk pengisiannya. Dengan kata lain, mereka tidak dipandu dalam membaca petunjuk instrumen. Dari segi keterbacaannya, petunjuk pengisian dan pertanyaan/pernyataan yang ada dalam instrumen dapat dipahami responden. Ini dibuktikan dengan tidak

adanya pertanyaan yang diajukan siswa ketika membaca petunjuk dan mengisi instrumen. Di samping itu, mereka dapat menjawab semua pertanyaan yang ada dalam instrumen sesuai dengan petunjuk pengisiannya.

Ada empat teknik yang bisa digunakan untuk menentukan reliabilitas instrumen, yaitu (a) *tes-retes*, (b) bentuk paralel, (c) *split-half* (belah dua), dan (d) teknik Kuder-Richardson (Anastasi & Urbina, 1997). Teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen adalah tes-retes. Dipilihnya teknik tes-retes karena teknik ini merupakan metode yang paling jelas untuk menemukan reliabilitas suatu alat ukur (Anastasi & Urbina, 1997). Dengan teknik ini bisa dilihat apakah jawaban responden pada pengadministrasian instrumen pertama sama atau tidak sama dengan jawaban pada pengadministrasian kedua. Ada dua langkah dalam menguji reliabilitas instrumen dengan teknik ini. Langkah pertama, mengadministrasikan dua kali instrumen kepada kelompok coba dengan selang waktu antara pengadministrasian pertama dan kedua sekitar satu minggu. Alasan penentuan waktu satu minggu adalah karena jika terlalu pendek jarak waktu antara pengadministrasian pertama dan kedua besar kemungkinan responden bisa mengingat jawabannya pada pengadministrasian pertama. Dengan kata lain, jawaban responden pada pengadministrasian kedua merupakan hasil ingatan mereka pada jawaban pengadministrasian pertama. Bila jarak waktu pengadministrasi pertama dan kedua lebih dari satu minggu (terlalu lama) korelasi skor pengadministrasi pertama dengan skor pengadministrasian kedua cenderung semakin rendah (Anastasi & Urbina, 1997). Langkah terakhir adalah mengorelasikan skor tiap-tiap responden (dalam hal ini skor total) pada pengadministrasian instrumen pertama dengan total skor pengadministrasian kedua untuk memperoleh koefisien realibilitas (nilai  $r$ ) (Tuckman, 1999).

Berdasarkan langkah-langkah di atas diperoleh koefisien reliabilitas instrumen sebesar 0,8096. Jika dibandingkan koefisien reliabilitas tersebut dengan koefisien reliabilitas instrumen yang baik, yaitu antara 0,80-an dan 0,90-an (Hood & Johnson, 1991; Anastasi & Urbina, 1997), maka reliabilitas

instrumen tersebut berada pada rentangan koefisien reliabilitas instrumen yang baik. Dengan demikian instrumen telah memiliki syarat dalam aspek reliabilitasnya.

#### D. Analisis data

Data yang telah terkumpul dari berbagai responden akan diolah dengan menggunakan teknik persentase (%) dan dinarasikan atau diolah secara kualitatif. Selanjutnya data yang diperoleh dipilah menjadi lima kategori, yaitu:

- a. Jumlah anak usia SD/MI, SMP/MTs dan APK SD/MI, SMP/MTs
- b. Jumlah lulusan SD/MI, SMP/MTs dan anak putus sekolah SD/MI, SMP/MTs
- c. Kondisi internal anak putus sekolah SD/MI, SMP/MTs
- d. Kondisi eksternal anak putus sekolah
- e. Kebijakan pelaksanaan W-9-T

Kelima kategori data di atas dikaitkan dengan pelaksanaan W-9-T di Sumatra Barat.

**Tabel 1. Rekapitulasi Jenis Data, Responden, Teknik Pengumpulan dan Pengolahannya**

No.	Jenis Data	Responden	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Pengolahan Data
1	Jumlah anak usia SD/MI, SMP/MTs, APK dan APM SD/MI, SMP/MTs	Kepala Dinas Provinsi	Studi dokumen	Persentase
2	Jumlah Lulusan SD/MI, SMP/MTs dan anak putus sekolah SD/MI, SMP/MTs	Kepala Dinas Provinsi	Studi dokumen	Persentase
3	Kondisi internal anak putus sekolah SD/MI, SMP/MTs	Siswa putus sekolah	Angket	Persentase
4	Kondisi eksternal anak putus sekolah SD/MI, SMP/MTs	Orangtua Kepala Sekolah	Wawancara	Persentase dan narasi
5	Kebijakan pelaksanaan W-9-T	Kepala Dinas Kabupaten Kepala Dinas Kecamatan Kepala Sekolah Komite Sekolah Dewan Pendidikan	Wawancara	Persentase Narasi

### E. Jadwal Kegiatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan (September, Oktober dan November 2006). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi rancangan sampel dan urusan administrasi, penyusunan instrumen, pengadministrasian instrumen (pengumpulan data), analisis data, penyusunan draf laporan, seminar/diskusi, dan penyempurnaan laporan akhir.

**Tabel 2. Jadwal Kegiatan Penelitian**

No	Kegiatan	Oktober				November				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Rancangan sampel dan urusan administrasi	X											
2	Penyusunan instrumen		X	X									
3	Pengumpulan data				X	X	X	X	X				
4	Analisis data								X	X	X		
5	Penulisan draf laporan										X	X	
6	Seminar hasil/Diskusi											X	
7	Penulisan laporan akhir											X	X

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

**1. Jumlah anak Usia Sekolah, APK dan APM SD/MI dan SMP/MTs Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2004/2005 dan 2005/2006**

Jumlah anak usia sekolah, APK dan APM SD/MI dan SMP/MTs di Sumatera Barat selama dua tahun terakhir dirangkum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3. Jumlah Anak Usia Sekolah, APK dan APM di Provinsi Sumatera Barat**

No	Aspek	SD/MI (7-12 th)		SMP/MTs (13-15 th)	
		2004/2005	2005/2006	2004/2005	2005/2006
1	Jumlah Anak Usia Sekolah	630.659	643.296	271.466	278.951
2	APK	109.37	112.46	87.32	87.61
3	APM	91.89	93.67	70.74	72.50

*Sumber: Dinas Pendidikan Sumatera Barat 2004 dan 2005*

Tabel di atas menggambarkan, jumlah anak usia sekolah di SD/MI (7-12 th) pada tahun 2005/2006 adalah 643.296 orang dan jumlah ini lebih banyak dari tahun 2004/2005. Pada tahun yang sama di SMP/MTs juga terjadi peningkatan jumlah anak usia sekolah 13-15 th. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI yang diperoleh pada tahun 2004/2005 meningkat persentasenya pada tahun 2005/2006, hal ini juga terjadi di SMP/MTs. Meningkatnya pencapaian ini juga diiringi oleh pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM), baik di SD/MI maupun di SMP/MTs pada tahun 2005/2006.

## 2. Jumlah Lulusan dan Jumlah Anak Putus Sekolah di SD/MI dan SMP/MTs Provinsi Sumatera Barat

Jumlah lulusan dan jumlah anak putus sekolah berdasarkan satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Sumatera Barat selama dua tahun terakhir dirangkum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4. Jumlah Lulusan dan Jumlah Anak Putus Sekolah Di Provinsi Sumatera Barat**

No	Aspek	SD/MI		SMP/MTs	
		2004/2005	2005/2006	2004/2005	2005/2006
1	Jumlah Lulusan	78.712	81.978	55.625	64.973
2	Jumlah Anak Putus Sekolah	3520	2831	3853	3402

*Sumber: Dinas Pendidikan Sumatera Barat 2004 dan 2005*

Tabel di atas menampakkan, bahwa jumlah lulusan pada di SD/MI pada tahun 2005/2006 sebanyak 81.978 orang. Data ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah lulusan dibandingkan dengan tahun 2004/2005. Peningkatan jumlah lulusan juga terjadi di SMP/MTs pada tahun yang sama. Sedangkan jumlah anak putus sekolah di SD/MI berjumlah 3520 untuk tahun 2005/2006, jika diperhatikan tahun 2004/2005 maka anak putus sekolah jumlahnya menurun. Demikian juga yang terjadi di SMP/MTs pada tahun yang sama, juga terjadi penurunan jumlah anak putus sekolah. Namun demikian, kelihatannya angka anak putus sekolah di SMP/MTs lebih tinggi dibanding SD/MI.

## 3. Faktor Internal Anak Putus Sekolah

Ada enam hal yang diukur berkaitan dengan faktor internal anak putus sekolah. Keenam hal tersebut adalah kemampuan, minat, persepsi tentang sekolah, harapan, aspirasi, dan perilaku dan cita-cita anak menurut pendapat orangtua. Temuan penelitian yang terkait dengan keenam faktor tersebut dirangkum dalam Tabel 5.

**Tabel 5. Faktor Internal Anak Putus Sekolah**

No	Faktor	%
<b>1</b>	<b>Kemampuan Anak dalam Belajar</b>	
	Di atas teman	15,28
	Sama dn tman	54,17
	Di bawah tmn	30,55
<b>2</b>	<b>Minat Anak untuk Sekolah/Belajar</b>	
	Tinggi Sekali	22,22
	Tinggi	15,28
	Cukup Tinggi	26,39
	Kurang	33,33
	Kurang Sekali	2,78
<b>3</b>	<b>Persepsi Anak tentang Sekolah</b>	
	Sangat bermanfaat untuk masa depan	80,56
	Tdk ada kaitannya dg masa depan	11,11
	Menghabiskan uang dan waktu	6,94
	Untuk orang kaya saja	1,39
<b>4</b>	<b>Harapan Anak</b>	
	Ingin Sekolah lagi dg kesadaran sendiri	50,00
	Sekolah lagi jika disuruh OT	11,12
	Tidak akan sekolah lagi	31,94
	Lain-lain	6,94
<b>5</b>	<b>Aspirasi/Cita-cita Anak</b>	
	Ingin menjadi dokter, hakim atau insinyur	25,00
	Menjadi polisi/TNI	27,77
	Menjadi pedagang	19,44
	Petani/nelayan	5,56
	Sopir, pilot/pramugari	4,17
	Perusahaan swasta	5,56
	Guru	6,94
	Lain-lain	5,56
<b>6</b>	<b>Perilaku dan Cita-cita Anak menurut orangtua</b>	
	Berperilaku baik selama sekolah	32,20
	Sering bolos dan nilainya rendah	37,29
	Memiliki cita-cita ingin kuliah di PT	32,20
	Cita-cita anak tidak jelas	10,17

Temuan penelitian menampakkan jumlah terbesar (54,17%) kemampuan anak putus sekolah sama dengan kemampuan teman-teman mereka, bahkan ada kemampuan mereka yang berada di atasnya (15,28%). Hanya sebagian kecil saja (30,55%) yang kemampuan mereka di bawah kemampuan teman mereka. Dengan kata lain, kemampuan anak putus sekolah secara umum tergolong baik.

Dari segi minat, persentase tertinggi (33,33%) responden kurang berminat untuk sekolah, dan hanya sedikit sekali (2,78%) yang kurang sekali minat mereka. Bila dijumlahkan persentase responden yang kurang berminat dan yang kurang sekali minat mereka jumlahnya sebanyak 36,11%. Itu berarti, sebagian besar responden (63,89%) memiliki minat yang cukup tinggi, tinggi, dan tinggi sekali. Singkatnya, minat responden untuk sekolah juga tergolong baik.

Hampir sama dengan kemampuan dan minat responden, persepsi mereka tentang sekolah juga tergolong baik. Sebagian besar (80,56%) mereka mengatakan bahwa sekolah sangat bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik. Dengan kata lain, hanya sebagian kecil saja mereka yang berpersepsi jelek tentang sekolah. Mereka ini berpendapat sekolah tidak ada kaitannya dengan masa depan (11,11%), sekolah menghabiskan uang dan waktu (6,94%), dan sekolah hanya untuk orang kaya saja (1,39%).

Terkait dengan persepsi mereka yang tergolong baik tentang sekolah, separuh (50,00%) di antara mereka ingin sekolah lagi dengan kesadaran sendiri, dan 11,12% mereka ingin sekolah lagi jika disuruh orang tua. Artinya sebagian besar (61,12%) mereka masih berharap untuk sekolah lagi. Hanya sebagian kecil saja (31,94%) responden yang tidak ingin sekolah lagi.

Aspirasi pekerjaan responden cukup bervariasi. Sebagian mereka (25% dan 27%) mempunyai aspirasi untuk jadi dokter, Hakim, Insinyur, dan TNI/Polisi. Dengan kata lain, aspirasi mereka relatif tinggi. Hanya sebagian kecil saja mereka yang ingin menjadi petani, sopir/nelayan, dan pekerjaan wiraswasta lainnya.

Sub-variabel terakhir yang diukur pada aspek internal adalah perilaku dan cita-cita anak menurut orangtua. Temuan penelitian menampakkan 32,20% anak berperilaku baik selama sekolah, dan 37,29% berperilaku kurang baik, seperti sering bolos dan memperoleh nilai jelek. Berkenaan dengan cita-cita responden, 32,20% anak memiliki cita-cita ingin

kuliah di perguruan tinggi. Hanya sebagian kecil saja (10,17%) siswa yang memiliki cita-cita yang tidak jelas.

#### 4. Faktor Eksternal Anak Putus Sekolah

Pada faktor eksternal anak putus sekolah ada lima hal yang diukur. Kelima hal tersebut adalah pekerjaan dan penghasilan orang tua, persepsi orang tua tentang kemampuan dan kemauan anak putus sekolah, persepsi orang tua tentang sekolah, dan faktor eksternal menurut siswa. Temuan penelitian yang terkait dengan kelima faktor tersebut dirangkum dalam Tabel 6 berikut ini.

**Tabel 6. Faktor Eksternal Anak Putus Sekolah**

No	Faktor	%
1	<b>Pekerjaan Orang Tua</b>	
	Petani/nelayan	54,24
	Buruh	25,42
	Pedagang	18,64
	Dll	1,69
2	<b>Penghasilan Orang Tua</b>	
	a. < Rp.500.000	69,49
	b. Rp.500.000 - Rp.1.000.000	20,34
	c. > Rp.1.000.000	10,17
3	<b>Persepsi Org Tua tentang Kemamp &amp; Kemauan Anak (Resonden memilih lebih dari 1)</b>	
	Anak sekolah atas kemauannya sendiri	13,56
	Anak rajin masuk sekolah	10,17
	Anak jarang masuk sekolah	33,90
	Anak tidak mau masuk sekolah	25,42
	Anak mau sekolah tapi dana tidak ada	27,12
	Anak membantu orang tua mencari nafkah	10,17
	Anak putus sekolah karena saudaranya juga sekolah	1,69
	Kemampuan anak lemah	11,86
	Selama sekolah prestasi belajar anak tinggi	6,78
	Selama sekolah prestasi anak selalu rendah	8,47
	Buku tidak lengkap karena uang tidak ada	13,56

4	<b>Persepsi Orangtua tentang Sekolah</b>	
	Sekolah sangat penting	66,67
	Sekolah tdk penting	14,29
	Tidak Sekolahpun juga bisa hidup mewah	3,17
	Sekolah hanya untuk org kaya	3,17
	Kalau sekolah tidak bisa membantu OT	4,76
	Pemerintah tdk mau membantu anak miskin	3,17
	Di daerah ini anak banyak tamat SD saja	3,17
	Di daerah ini tidak ada SLTP	1,60
5	<b>Faktor Eksternal yang Menyebabkan siswa PS (Menurut Siswa)</b>	
	Kekurangan biaya	51,39
	Tidak ada yang membiayai sekolah	9,72
	Orangtua meminta untuk berhenti sekolah	2,78
	Dikeluarkan oleh sekolah	6,94
	Pelajaran tidak saya pahami	19,44
	Teman banyak yang tidak sekolah	4,17
	Saya takut sekolah karena diganggu teman	2,78
	dll	2,78

Tabel 6 menggambarkan, faktor eksternal yang mempengaruhi anak putus sekolah cukup heterogen. Kalau diperhatikan dari segi pekerjaan orang tua, sebagian (54,24%) bekerja sebagai petani dan/atau nelayan, lainnya adalah buruh dan pedagang. Dilihat penghasilan mereka, lebih dari separoh (69,49%) orang tua berpenghasilan kurang dari Rp. 500.000,- perbulan, dan mereka yang berpenghasilan Rp. 500.000,- s.d Rp. 1.000.000,- sebanyak 20,34%. Hanya 10,17% responden yang berpenghasilan lebih dari Rp. 1.000.000,- .

Orang tua memiliki persepsi yang bervariasi tentang kemampuan dan kemauan anak untuk belajar di sekolah. Sebagian orang tua (13,56%) menyatakan anaknya bersekolah atas kemauannya sendiri, 10,17% menyatakan anaknya rajin masuk sekolah, tetapi juga ada sebagian orang tua (33,90%) yang menyatakan anaknya jarang masuk sekolah, dan 25,42% menyatakan anaknya tidak mau sekolah.

Ditinjau dari persepsi orang tua tentang sekolah, sebagian besar (66,67%) orang tua mereka menyatakan sekolah itu sangat penting untuk

masa depan anaknya. Hanya sebagian kecil saja (< 9.00%) mereka yang menyatakan sekolah tidak penting. Alasan-alasan lain yang menyatakan bahwa sekolah itu tidak penting di antaranya tidak sekolahpun juga bisa hidup mewah, daerah ini banyak yang tidak tamat SD, dan kalau sekolah tidak dapat membantu orang tua.

Faktor eksternal yang menyebabkan anak putus sekolah (menurut siswa), sebagian besar (71.00%) adalah karena faktor kesulitan ekonomi, sehingga orang tua meminta untuk berhenti sekolah karena tenaganya diperlukan untuk membantu mencari nafkah. Selanjutnya adalah karena dikeluarkan oleh sekolah, pelajaran tidak dipahami, faktor teman sebaya yang banyak tidak sekolah. Siswa juga mengatakan bahwa ia merasa takut sekolah karena diganggu oleh temannya.

**4. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Sekolah, dan Masyarakat dalam Pelaksanaan W-9-T**

Berbagai upaya telah dilakukan berbagai pihak untuk menyukseskan W-9-T di Sumatera Barat. Temuan penelitian tentang berbagai upaya tersebut dirangkum dalam Tabel 7, Tabel 8, dan Tabel 9.

**Tabel 7. Upaya yang Dilakukan dalam Melengkapi Sarana dan Prasarana**

No.	Upaya yg Dilakukan	Persentase Jawaban Responden			
		Pemerintah	Sekolah	Masyarakat	Keseluruhan
1	Minta bantuan Orang Tua	33,33	41,67	61,54	49,15
2	Minta bantuan Pemerintah	66,67	75,00	69,23	71,19
3	Minta bantuan Alumni	11,11	8,33	11,54	10,17
4	Minta bantuan Pengusaha	22,22	8,33	0	6,78
5	Minta bantuan Masyarakat	11,11	33,33	0	15,25

*Catatan: Responden ada yang memberikan jawaban lebih dari satu pilihan*

Data di atas memperlihatkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pelaksanaan W-9-T dalam melengkapi sarana dan prasarana yang ada di sekolah pada umumnya dengan memanfaatkan bantuan dari pemerintah. Baik sekolah maupun masyarakat juga cenderung melakukan upaya dengan meminta bantuan pemerintah. Di samping itu, ketiga pihak ini juga mengupayakan minta bantuan pada orang tua siswa, yakni melalui hasil musyawarah yang dilakukan oleh Komite Sekolah. Usaha lain yang juga dilakukan adalah minta bantuan pengusaha, alumni dan masyarakat. Pihak masyarakat memang tidak ada yang mengatakan bahwa upaya yang dilakukan dengan meminta bantuan pengusaha dan masyarakat itu sendiri. Meskipun demikian, persentase yang cukup signifikan dalam hal ini adalah mengupayakan diperolehnya bantuan pemerintah dan orang tua siswa. Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan pemerintah, sekolah dan masyarakat dalam melengkapi sarana dan prasarana yang ada di sekolah dalam rangka W-9-T Tahun adalah melalui bantuan pemerintah, dengan persentase jawaban sebesar 71,19%.

Berkenaan bantuan yang diberikan untuk mencegah anak putus sekolah hasil dirangkum dalam Tabel 8.

**Tabel 8. Bantuan yang Diberikan dalam Mencegah Anak Putus Sekolah**

No.	Upaya yang Dilakukan	Persentase Jawaban Responden			
		Pemerintah	Sekolah	Masyarakat	Keseluruhan
1	Bebas SPP	33,33	58,33	46,15	49,15
2	Bebas Uang Masuk	22,22	25,00	38,46	30,51
3	Beri Beasiswa	66,67	66,67	50,00	59,32
4	Mencari Orang Tua Asuh	22,22	33,33	19,23	25,42

*Catatan: Responden diberi kesempatan memberikan jawaban lebih dari satu pilihan*

Informasi yang tersaji pada Tabel 8 menggambarkan bahwa upaya untuk mencegah atau mengantisipasi siswa putus sekolah yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan beasiswa dan pemberian bebas SPP. Hal yang sama juga dikemukakan oleh pihak sekolah (dalam hal ini Kepala Sekolah) dan juga masyarakat. Ketiga pihak ini memberikan jawaban yang senada bahwa pemberian beasiswa merupakan upaya yang telah dilakukan di samping pembebasan SPP sehingga persentase jawaban ketiga pihak ini tergolong tinggi. Di samping dua upaya itu, baik pemerintah, sekolah maupun masyarakat juga mengatakan bahwa upaya lain yang dilakukan adalah membebaskan uang pendaftaran dan mencari orang tua asuh. Secara keseluruhan, upaya dalam mengantisipasi siswa putus sekolah, baik yang dikemukakan oleh pemerintah, sekolah, dan masyarakat adalah dengan pemberian beasiswa, yakni dengan persentase jawaban sebesar 59,32%.

Masyarakat juga berperan aktif dalam pelaksanaan W-9-T. Peran Mereka dirangkum dalam Tabel 9.

**Tabel 9. Upaya Masyarakat dalam Pelaksanaan W-9-T**

No	Upaya yang Dilakukan	Persentase Jawaban Responden			
		Pemerintah	Sekolah	Masyarakat	Keseluruhan
1	Mewakafkan Tanah	33,33	33,33	11,54	23,73
2	Membangun Sekolah Baru	33,33	20,83	42,31	37,29
3	Mencari Donatur	33,33	45,83	34,62	38,98

Tabel 9. di atas berkenaan dengan dengan upaya yang dilakukan masyarakat dalam pelaksanaan W-9-T, menurut pemerintah (dalam hal ini pihak Dinas Pendidikan), masyarakat telah mewakafkan tanah, ikut serta dalam membangun sekolah baru, dan berupaya mencari donatur. Keterangan yang diperoleh dari pihak sekolah (Kepala Sekolah), usaha masyarakat yang

agak banyak adalah mencari donatur, sedangkan menurut masyarakat sendiri (dalam hal ini Komite Sekolah), mereka lebih banyak mengatakan bahwa upaya masyarakat adalah membangun sekolah baru dan mencari donatur. Dari jawaban ketiga kelompok responden dapat dirangkum bahwa upaya mencari donatur dan membangun sekolah baru merupakan upaya yang dominan dilakukan, sedangkan upaya mewakafkan tanah juga ada, namun persentasenya tergolong kecil.

## **B. Pembahasan**

### **1. Jumlah anak Usia Sekolah, APK dan APM di SD/MI dan SMP/Mts di Provinsi Sumatera Barat**

Mencermati jumlah anak usia sekolah di SD/MI (7-12th) dan SMP/MTs (13-15 th), APK dan APM di kedua satuan pendidikan tersebut, menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah pada tahun 2005/2006 dari tahun 2004/2005. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk secara keseluruhan dan meningkatnya daya tampung sekolah untuk anak usia SD/MI dan SMP/MTs dan dibarengi oleh meningkatnya aspirasi anak, orang tua, dan masyarakat terhadap pendidikan. Di samping itu, berbagai upaya juga telah dilakukan oleh pemerintah untuk penuntasan W-9-T misalnya pemberian dana BOS, dana transisi dan retrieval. Adanya program tersebut membantu orang tua (terutama untuk keluarga miskin) dalam meringankan biaya pendidikan anak-anak mereka.

### **2. Jumlah Lulusan dan Jumlah Anak Putus Sekolah di SD/MI dan SMP/MTs di Sumatera Barat**

Berkaitan dengan kenaikan jumlah lulusan di SD/MI maupun di SMP/MTs disebabkan oleh meningkatnya jumlah anak usia sekolah dan kemungkinan juga dibarengi oleh terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran/pendidikan. Kondisi anak putus sekolah di SD/MI dan SMP/MTs jumlahnya menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan oleh

adanya peningkatan partisipasi dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Dari gambaran tersebut bisa dikatakan bahwa upaya pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan mencegah anak putus sekolah secara bertahap dapat terealisasi. Dengan kata lain kebijakan pelaksanaan W-9-T di Sumatera Barat mulai membuahkan hasil walaupun secara kuantitatif capaiannya belum signifikan.

### **3. Faktor Internal Anak Putus Sekolah**

Data menunjukkan bahwa anak-anak yang putus sekolah memiliki kemampuan sama dengan teman-teman mereka lainnya. Ini berarti bahwa dari segi kemampuan, anak putus sekolah sebenarnya memiliki potensi yang memadai untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Dengan demikian mereka putus sekolah bukan diakibatkan oleh kemampuan mereka yang rendah, melainkan disebabkan oleh faktor-faktor lain. Dilihat dari minat anak, sebagian dari mereka memiliki minat yang tinggi untuk bersekolah. Artinya, mereka memiliki dorongan yang besar untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini didukung juga oleh jawaban siswa bahwa sebagian besar dari mereka mempunyai persepsi yang positif terhadap pentingnya bersekolah, seperti sekolah itu sangat bermanfaat untuk masa depan. Lagi pula sebagian dari anak-anak putus sekolah memendam harapan yang cukup besar untuk bersekolah lagi.

Gambaran berkenaan dengan aspirasi/cita-cita mereka tentang dunia kerja, ternyata perhatian mereka tertuju pada bidang pekerjaan dan profesi yang tergolong diminati oleh banyak orang seperti; polisi/TNI, dokter, hakim dan insinyur. Menurut pandangan orang tua mengenai perilaku dan cita-cita anak sebagian memiliki perilaku yang baik selama sekolah dan memiliki cita-cita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, meskipun ada sebagian dari mereka yang sering bolos dan nilainya rendah. Hal ini terjadi pada anak-anak yang memang memiliki kemampuan dan minat mereka rendah.

#### **4. Faktor Eksternal Anak Putus Sekolah**

Faktor ekonomi mendominasi terjadinya anak putus sekolah di SD/MI dan SMP/MTs di Sumatera Barat. Hal ini dikuatkan oleh adanya penghasilan orang tua yang pada umumnya (70.00%) rendah yaitu kecil dari Rp. 500.000,- perbulan. Dengan penghasilan sebanyak itu, jelas hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja (makan/minum dan pakaian). Hal ini sejalan dengan pendapat siswa bahwa mereka tidak dapat melanjutkan sekolah karena kekurangan biaya untuk memenuhi kebutuhan belajar/sekolahnya. Walaupun ada faktor lainnya, seperti anak jarang masuk sekolah/sering bolos, anak sulit memahami pelajaran di sekolah tetapi persentasenya kecil. Ini mengisyaratkan bahwa anak yang mengalami putus sekolah pada umumnya bukan karena kemampuan berpikirnya rendah tetapi karena ketidak mampuan orang tua untuk membiayai sekolah anaknya.

Lebih dari 71.00% orang tua berpendapat bahwa sekolah itu sangat penting untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Hanya sebagian kecil (rata-rata sekitar 3.00%) orang tua yang mempunyai persepsi sekolah itu tidak penting, seperti kalau sekolah tidak dapat membantu orang tua mencari nafkah, sekolah itu tidaklah penting karena sesudah tamat nantinya juga sulit mencari pekerjaan. Ini mengisyaratkan bahwa apresiasi orang terhadap sekolah dan pendidikan untuk masa depan anaknya cukup tinggi.

#### **5. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Sekolah, dan Masyarakat dalam Pelaksanaan W-9-T**

Sejalan dengan jabaran di atas, yakni tentang upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pelaksanaan W-9-T dalam melengkapi sarana dan prasarana adalah dengan memanfaatkan bantuan yang telah disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan jawaban pihak sekolah dan masyarakat tergambar bahwa bantuan pemerintah untuk itu memang ada dikucurkan ke sekolah-sekolah. Hal ini menandakan bahwa dukungan dana yang

disediakan pemerintah dalam melengkapi sarana dan prasarana sekolah memang dapat dinikmati oleh sekolah-sekolah.

Di samping itu, keikutsertaan pihak orang tua siswa dalam membantu melengkapi sarana dan prasarana sekolah merupakan bukti bahwa, para orang tua memiliki kepedulian terhadap kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Hal ini juga sekaligus merupakan keberhasilan pihak Komite Sekolah dalam merangkul para orang tua untuk ikut memberikan andil mereka untuk keperluan pendidikan. Upaya meminta bantuan dari para pengusaha dan masyarakat pada umumnya sebenarnya juga dapat ditingkatkan dengan mengembangkan pola kerjasama antara sekolah dan warga masyarakat yang memperoleh keberhasilan dalam bidang usaha dan para perantau yang berasal dari daerah setempat. Apalagi mereka pasti ada yang merupakan alumni dari sekolah yang ada di daerah itu.

Sehubungan dengan upaya yang dilakukan dalam mencegah atau mengantisipasi siswa putus sekolah seperti di gambarkan di atas menunjukkan bahwa pemberian beasiswa dan pembebasan SPP sangatlah dominan. Ini berarti bahwa persoalan ekonomi memang merupakan masalah krusial sebagai faktor utama kelangsungan pendidikan anak-anak, sehingga pihak sekolah maupun masyarakat memang mengharapkan agar pemerintah tetap dan selalu menyediakan dana untuk alokasi beasiswa dan upaya pembebasan SPP. Pihak sekolah juga mulai membuat kebijakan di dalam mengantisipasi siswa putus sekolah, yakni berupa pembebasan uang pendaftaran dan mencari orang tua asuh. Pembebasan uang pendaftaran masih dilakukan oleh beberapa sekolah, dan upaya mencari orang-orang yang memiliki keberhasilan secara ekonomi sebagai orang tua asuh mulai berkembang. Hal ini sekaligus memberi dorongan bagi upaya masyarakat dalam membantu anak-anak dalam pembiayaan sekolah mereka melalui peran orang tua asuh, sehingga populasi siswa putus sekolah dapat berkurang.

Berdasarkan data yang diperoleh berkenaan dengan upaya yang dilakukan masyarakat dalam pelaksanaan W-9-T, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat dalam hal pentingnya pendidikan mulai tumbuh. Hal ini dibuktikan bahwa mulai ada anggota masyarakat yang rela mewakafkan tanah mereka dalam rangka memberi peluang dalam membangun sekolah, dan malahan masyarakat dengan dimotori oleh Komite Sekolah ikut serta berkorban, baik secara dana dan tenaga dengan secara bergotong royong membangun sekolah baru, dan sekaligus berupaya mencari donatur.

## **BAB V**

### **SIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Simpulan**

Sejalan dengan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya , maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah anak usia sekolah, APK dan APM SD/MI (7-12th) dan SMP/MTs (13-15th) pada tahun 2005/2006 dibanding tahun 2004/2005 sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun-ke tahun. Di samping itu mengisyaratkan meningkatnya kesadaran untuk berpartisipasi dalam sekolah/mengikuti pendidikan khususnya pada usia 7-12th dan 13-15th.
2. Meningkatnya jumlah lulusan di SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2005/2006 dibanding tahun 2004/2005 merupakan konsekuensi logis dari bertambahnya anak usia sekolah pada kedua tingkatan tersebut. Tetapi terjadinya penurunan anak putus sekolah baik di SD/MI maupun di SMP/MTs merupakan dampak dari apresiasi dan upaya orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam rangka menyukseskan W-9-T. Tingginya angka anak putus sekolah di SMP/MTs dibanding SD/MI merupakan isyarat bahwa wajib belajar di SD/MI telah sukses dibanding SMP/MTs.
3. Penyebab anak putus sekolah di SD/MI dan SMP/MTs apabila dilihat dari faktor internal tidak begitu signifikan pengaruhnya. Bahkan persepsi dan harapan anak untuk sekolah cukup tinggi.
4. Faktor yang menyebabkan anak putus sekolah lebih besar (dominan) dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi orang tua karena ternyata penghasilan orang tua pada umumnya di bawah Rp. 500.000,- dengan pekerjaan orang tua anak yang terbanyak adalah sebagai petani/nelayan.

5 Upaya yang dilakukan dalam melengkapi sarana dan prasarana sekolah lebih dominan dengan meminta bantuan pemerintah. Sekolah bersama masyarakat (Komite Sekolah) telah berupaya merangkul orang tua siswa untuk ikut membantu sekolah dalam upaya dimaksud. Upaya dalam merangsang para pengusaha, alumni, dan masyarakat pada umumnya telah dilakukan namun masih sangat minim. Upaya dalam mencegah anak putus sekolah juga cukup menggembirakan, di mana anak diberi beasiswa, pembebasan SPP, dan sekolah pun berupaya membebaskan uang masuk bagi anak. Mencari orang tua asuh bagi anak yang terancam putus sekolah juga sudah mulai diupayakan. Bila ditinjau dari segi upaya masyarakat dalam pelaksanaan W-9-T pada dasarnya sudah mulai berkembang, seperti adanya masyarakat yang mewakafkan tanah untuk areal sekolah, dan bergotong royong membangun sekolah baru serta mencari donatur.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu melanjutkan program pemberian bantuan bagi sekolah terutama dalam meringankan beban biaya pendidikan khususnya bagi orang tua yang tidak mampu termasuk peningkatan dari segi besarnya jumlah bantuan yang diberikan. Sekolah seharusnya lebih meningkatkan kegiatan sosialisasinya kepada para orang tua tentang adanya dana yang disiapkan oleh pemerintah untuk membantu keluarga yang tidak mampu membiayai anaknya terutama anak-anak yang terancam putus sekolah. Karena anak putus sekolah lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternalnya, khususnya kondisi ekonomi orang tua.
2. Pemerintah diharapkan selalu menyediakan dana dalam melengkapi sarana dan prasarana sekolah, dan memperbanyak jumlah pemberian beasiswa bagi anak. Sekolah hendaknya memanfaatkan dukungan dana dari pemerintah secara efektif sekaligus merangkul peran masyarakat melalui Komite Sekolah dalam mengantisipasi anak putus sekolah dan pelaksanaan W-9-T.

Masyarakat hendaklah menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi dan perkembangan sekolah yang ada di daerahnya.

3. Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota melalui Dinas Pendidikan perlu selalu memutakhirkan data tentang jumlah orang tua yang kurang mampu yang menyebabkan anak putus sekolah. Dengan data yang mutakhir dan benar Pemerintah dapat mengetahui kondisi masyarakat/orang tua yang benar-benar sangat membutuhkan bantuan biaya pendidikan.

### **C. Rekomendasi Kebijakan**

1. Pemerintah perlu menyempurnakan aturan-aturan yang baku sebagai kendali dan sekaligus sebagai kontrol terhadap pemberian bantuan dana kepada sekolah, agar lebih tepat guna dan tepat sasaran, melalui berbagai media informasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat.
2. Pemerintah perlu membangun sistem kerjasama yang terpadu antara pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan W-9-T seperti peran pemerintahan desa, pemuka masyarakat, dan pengusaha. Dengan demikian, tanggung jawab pelaksanaan pendidikan pada umumnya, dan W-9-T khususnya, tidak hanya tertumpu pada pihak pemerintah (dalam hal ini Dinas Pendidikan) saja.

## CURRICULUM VITAE

**N a m a** : Drs. Alwen Bentri, M.Pd  
**NIP.** : 131 584 115  
**Pangkat / Gol.** : Lektor Kepala/IV/a  
**Pekerjaan** : Dosen FJP - UNP  
**Jabatan** : Sekretaris Lemlit UNP  
Staf Ahli Pembantu Rektor I UNP  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Payakumbuh, 50 Kota/22 Juli 1961  
**Alamat Kantor** : Jl. Prof. Hamka AirTawar-Padang  
Telp. 0751-55689-443450  
**Alamat rumah** : Jl. Asra Gang Muhajirin II No.7 Tg.Hitam Padang  
Telp. (0751) 462660  
HP. 08126628167

### ***Riwayat Pendidikan:***

1. SD (berijazah tahun 1975)
2. SMPN 3 Payakumbuh (berijazah tahun 1978)
3. SPGN Padang Panjang (berijazah tahun 1981)
4. **Sarjana Pendidikan (S1) IKIP Padang**  
Program Studi Pengembangan Kurikulum (berijazah tahun 1985)
5. Magister) Pendidikan (S2) UPI Bandung  
Program Studi Pengembangan Kurikulum (berijazah tahun 1994)
6. Program Doktor (S3) Universitas Negeri Padang  
Program Studi Ilmu Pendidikan (Mulai thn 2003 s.d sekarang)

### ***Mata Kuliah yang dibina:***

Belajar dan Pembelajaran  
Pengantar Pendidikan  
Pengantar Pengembangan Kurikulum  
Kajian Kurikulum yang Bertaku  
Metode Penelitian Kualitatif

### ***Penelitian dan Karya Ilmiah***

1. Implementasi Kurikulum di SD Kecil dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Penelitian 1994)
2. Aspirasi Pemuda Sumatera Barat (Penelitian, 1995)
3. Penerapan Sistem Pengajaran Merangkap Kelas (Makalah, 1996)
4. Kurikulum Muatan Lokal; Konsep dan Pelaksanaannya (Makalah, 1995)
5. Teknologi Pendidikan; Teori dan Aplikasi (Buku;1997)
6. Pengembangan Kurikulum dan Silabus Mata Kuliah (Makalah, 1998)
7. Kurikulum SD; Tinjauan dalam Dimensi Dokumentasi dan Implementasi (Makalah, 2000)
8. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana JPS Bidang Pendidikan di Jawa Barat, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Tahun 2000.
9. Pengembangan Kurikulum (Makalah, 2000)
10. Upaya Peningkatan Guru SD dalam Rangka Merealisasikan Kurikulum SD 1994 (Makalah, 1996)

11. Kurikulum Sekolah Dasar Tinjauan dalam Dimensi Implementasi (Makalah, 1995)
12. Konsep dan Penerapan Pendekatan Sistem dalam Pengajaran (Makalah, 1998)
13. Memberdayakan Guru Sebagai Pengembang Kurikulum. (Buletin IKIP Padang, 1998)
14. Pengajaran Kooperatif untuk Meningkatkan Respon Siswa dalam Pembelajaran Matematika di SD (Penelitian, 1997)
15. Kajian Terhadap Model-Model Pengembangan Kurikulum (Makalah, 1997)
16. Survey Pendidikan Sumatera Barat (Penelitian, 2003)
17. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pendidikan Dasar Provinsi Sumatera Barat (Penelitian, 2002,2003,2004).
18. Arah pengembangan Kurikulum dalam Menyikapi Otonomi Pendidikan: Peluang dan Tantangan (Forum Pendidikan No.03 Desember 2005)

***Pengalaman Pekerjaan dan Jabatan:***

1. Dosen Tetap Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan FIP UNP Padang sejak tahun 1986 s/d sekarang)
2. Sekretaris UPP III PGSD FIP UNP tahun 1995 s/d 1997
3. Sekretaris Pusat Kajian Ilmu Pendidikan FIP UNP Padang tahun 1996 s/d 1999
4. Anggota Senat FIP UNP tahun 1998 s/d sekarang
5. Sekretaris Senat FIP UNP tahun 1998 s/d 2003
6. Sekretaris Jurusan KTP FIP IKIP Padang tahun 1998 - 1999)
7. Konsultan Bidang Kurikulum pada STAIN Bukittinggi dan MTI Candung Bukittinggi tahun 1998 s/d 2002
8. Panitia Raker UNP tahun 2000 s.d sekarang
9. Ketua Panitia Raker UNP thn 2003
10. Tim Monitoring dan Evaluasi Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar Sumatera Barat, thn 2002, 2003, 2004.
11. Panitia Wisuda UNP thn 2000 s.d sekarang
12. Panitia SPMB Padang thn 2000 s.d sekarang
13. Tim Penyusun Tata Cara Pemilihan Pimpinan UNP thn 2003-2007
14. Tim Pemberian Penghargaan Bidang IPTEK dan Seni 50 thn UNP thn 2004
15. Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Jalur (PMDK) UNP 2002 s.d sekarang
16. Pengurus/Pengelola BKS-PTN Wilayah Barat Unit UNP thn. 2000 s.d sekarang
17. Tim Penyusun RENSTRA UNP tahun 1999-2005
18. Staf Ahli Pembantu Rektor I UNP tahun 2000 s/d sekarang
19. Panitia Pemilihan Dosen Teladan UNP thn 2004 dan 2005
20. Tim Penyusun Proposal dan Pelaksana Hibah Kemitraan Prodi TP thn 2005
21. Tim Sistem Perencanaan, Penyusunan Program dan Penaggaran (SP4) UNP Thn 2002 s/d sekarang
12. Panitia Penerimaan CPNS-UNP thn 2004,2005 dan 2006
13. Tim Penyusun Pidato Rektor thn 2000 s.d sekarang.
14. Tim Asistensi/Ahli Penyusunan STRADA Pembangunan Daerah Tertinggal Sumatera Barat thn 2006
15. Sekretaris Panitia Seleksi CPNS Sumalera Barat thn 2005
16. Sekretaris Lemlit UMP 2005 s/d sekarang
17. Ketua Iluni Prodi TP FIP UNP thn 2005 s.d sekarang

### **Prestasi/Penghargaan**

Dosen Teladan II Universitas Negeri Padang tahun 1998

#### **Sugengsihan/Seminar/Pelatihan :**

1. Peserta Seminar Ilmiah: Ilmu-Ilmu Sosial dan Pendalaman Agama tanggal 5 Agustus 1992 di Bandung
2. Peserta Seminar; Pengembangan Kurikulum Menghadapi Pembangunan Pendidikan Jangka Panjang Tahap Kedua tanggal 25 Juli 1992 di Bandung
3. Fasilitator; Pelatihan Guru Kelas Sd Yayasan Pendidikan Cendana Rumbai Pekan Baru tanggal 1-6 Juli 1996 di Padang
4. Peserta Seminar; Kajian Komparatif tentang Sistem Pendidikan di USA dan Jepang tanggal 28 Desember 1991 di Bandung
5. Peserta Pelatihan Bahasa Inggris di Balai Bahasa UNP tahun 1997
6. Peserta Seminar; Pengembangan Kurikulum dan PBM Dosen dan Guru-guru SMU/SMK se-Sumatera Barat tanggal 1-3 Juli 1999
7. Peserta; The First International Symposium; Networking Into the 21<sup>st</sup> Century (Prospects for Distance Education) 27 Nopember s/d Desember 1995 di Yogyakarta
8. Peserta; The Fourth Symposium on Distance Education and Open Learning; Technology and Educational Reform tanggal 1-3 Desember 1998 di Bandung
9. Peserta; The Fifth Symposium on Open and Distance Learning; Improving Workfore Productivity tanggal 29 Nopember s/d 2 Desember 1999 di Surabaya
10. Peserta; KONASPI (Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia), September 2000 di Jakarta.
11. Panitia dan Peserta Seminar; pada Rapat Tahunan Rektor BKS PTN Wilayah Barat tahun 2000 di Bukittinggi.
12. Peserta Pelatihan Pengelolaan Akademik PT Wil. Barat di Bukittinggi thn 2004 di Pekanbaru
13. Peserta Seminar Pengembangan Aplikasi High-Touch dan High Tech dalam Pembelajaran di Sekolah tahn 2005
14. Panitia Pertemuan Rektor LPTK Se Indonesia Juli 2005 di Padang
15. Peserta; KONASPI (Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia), Februari 2005 di Surabaya
16. Peserta Diskusi Panel "Peran Teknoogi Pendidikan dalam Penerapan TI dan K di sekolah" Agustus 2005
17. Semianar Internasional Teknologi Penididikan September 2005 di Solo.
18. Panitia Seminar Internasional dan Pertemuan JIP/FIP se-Indonesia September 2005 di Bukittinggi.
19. Peserta Pelatihan Metodologi Penetian PPKP dan PTK Wil. Barat Agustus 2005 di Batam
20. Fasilitator Pelatihan Metodologi PTK Bagi Guru-guru SMP dan SMU se Sumatera Barat Sepelembur 22-10-2005
21. Fasilitator Pelatihan Metodologi PTK bagi Dosen PT se Sumatera Barat September 2005
22. Peserta Seminar dan Lokakarya Nasional Penulisan Artikel untuk Jurnal Ilmiah Angkatan V di Padang Desember 2005.
23. Peserta Seminar Nasional Ikatan Alumni UPI Bandung thn 2006

Padang, 27 Juli 2006

Ybs,



Drs. Alwer Bentri, M.Pd.

*CURRICULUM VITAE*  
KETUA LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

nama	Prof. Dr. H. Anas Yasin, M.A.
no. P	: 130365634
tingkat/Jabatan	: IV/d, Guru Besar
alamat	Jl. Belibis B8, Air Tawar, Padang 25131
alamat rumah	Kampus UNP, Air Tawar, Padang 25131
telepon	Telp/Fax : (0751) 443450
	HP (Flexi) : (0751) 7860021
	HP : 08126733784
	email : <a href="mailto:ay178@yahoo.com">ay178@yahoo.com</a>
	website : <a href="http://www.geocities.com/ay178/ay03.html">http://www.geocities.com/ay178/ay03.html</a>
Tempat dan Tanggal lahir	: Kerinci, 17 Agustus 1945
Latar Belakang Pendidikan	: 1. Master of Art (Bidang Linguistik dan Pengajaran Bahasa), Ohio University, USA, 1983 2. Doktor (Bidang Pendidikan Bahasa), IKIP Malang, 1991
Kedudukan Saat Ini	Ketua Lembaga Penelitian UNP
Bidang Ilmu dan Spesialisasi	1. Kajian Bahasa (Inggris) 2. Pengajaran Bahasa (Inggris) 3. Penelitian Bahasa (Inggris) 4. Penelitian Pengajaran Bahasa (Inggris)
Publikasi Ilmiah	1. Struktur Bahasa Lembak (Pusat Pembinaan Bahasa Jakarta) 2. Struktur Bahasa Mentawai (Pusat Pembinaan Bahasa Jakarta) 3. Struktur bahasa Minangkabau (Pusat Pembinaan Bahasa Jakarta) 4. Kata Tugas Bahasa Kerinci (Pusat Pembinaan Bahasa Jakarta) 5. Hibah Pengajaran: Pengembangan Keterampilan Menulis melalui Latihan Pengalihan <i>Genre</i> Wacana dan Jenis Teks (Jurnal Skolar Pasca Sarjana UNP, terakreditasi) 6. Model Rancangan Materi <i>English for Specific Purposes (ESP)</i> Bidang Pariwisata Berdasarkan Kajian Kebutuhan ( <i>Needs Assessment</i> ) (Jurnal Forum Pendidikan UNP, terakreditasi) 7. Pembentukan dan Pengembangan Sikap, Motivasi, dan Penguasaan Konsep-Konsep Penelitian

yang Terdapat pada Media Internet (Jurnal Skolar Pascasarjana, UNP, terakreditasi);

8. Peningkatan Motivasi Belajar, Berpikir Kritis, dan Intensitas Kerja Mahasiswa melalui *Computer Mediated Communication (CMC)* dan Pengajaran Suplemental (PS), (Jurnal Skolar Pascasarjana, UNP, terakreditasi)
9. Pengukuran dan Asesmen, (Jurnal Skolar Pascasarjana, UNP, terakreditasi)
10. Tes Kompetensi Komunikatif dalam Pembelajaran Bahasa, (Jurnal Skolar Pascasarjana, UNP, terakreditasi)
11. Analisis Hubungan Kausal Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Berbicara Bahasa Inggris Tamatan SMU Se-Kodya Padang, (Forum Pendidikan, UNP, terakreditasi)
12. Model Asesmen Portofolio untuk Pengajaran bahasa Inggris sebagai Bahasa Asing, (Jurnal Skolar Pascasarjana, UNP, terakreditasi)
13. Beberapa Pertimbangan dalam Pembakuan dan Pengajaran Bahasa Indonesia, (Jurnal Skolar Pascasarjana, UNP, terakreditasi)
14. Arah Kajian Bahasa: Kaitannya dengan Perkembangan Pendidikan, IPTEK, dan Sosial Budaya, (Jurnal Skolar Pascasarjana, UNP, terakreditasi)
15. A Systemic Analysis of Preassessment for the System of English Teaching Program at Indonesian Schools, (Selected Articles from 41<sup>st</sup> TEFLIN International Seminar)
16. Pragmatik: Terapan dan Masalahnya dalam Pengajaran Bahasa Asing di Indonesia

Perjalanan / Seminar

Seminar dan Workshop Nasional

1. Peserta pada TEFL Upgrading Course (Held by Australian Language Center, 1985)
2. Peserta pada Workshop dan Seminar Linguistik (Fakultas Sastra UNAND), Sponsored by University of Frankfurt, West Germany, 1986
3. Pertemuan Ilmiah Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI) Jawa Timur, IKIP Malang, 1989
4. Peserta pada Workshop on Communicative Techniques for Teaching English, (Sponsored by AIDP Project), American Embassy, 1990.
5. Peserta pada Seminar on Strategies for Teaching about the United States (Sponsored by USIS,

- Embassy of the United of Ame rica), 1992
6. Peserta pada Lokakarya Peningkatan Kesesuaian Pendidikan (Link and Match), Universitas Bung Hatta, 1994
  7. Peserta pada Penataran Pembinaan Kurikulum PTS se Kopertis Wilayah X, 1997
  8. Peserta Lokakarya Manajemen Internal, Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, UNP, 1999
  9. Pemakalah pada Lokakarya Survey Pasar Kerja, Jurusan Bahasa Inggris, FBSS UNP, 2000
  10. Pemakalah pada Seminar Nasional MLI "Bahasa dan Perubahan Sosial", Universitas Andaias, Padang, 2000
  11. Peserta pada Semlok Nasional Pengelolaan dan PENYUNTINGAN Jurnal Ilmiah di Perguruan Tinggi Angkatan XI, 2001
  12. Pemakalah pada Semlok Sosialisasi Pemanfaatan Sarana Laboratorium CALL, Jurusan Bahasa Inggris, FBSS UNP, 2001
  13. Panelis pada Diskusi Panel Nilai Kejujuran dan Kepedulian, Universitas Sriwijaya, 2002
  14. Pemakalah pada Pertemuan Ilmiah MLI "Mengkaji Bahasa dan Menemukan Metode Pengajaran Bahasa Mutakhir, Universitas Negeri Padang, 2002
  15. Pemakalah pada Semlok "Materi Ajar Mata Kuliah Linguistik" Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, FBSS UNP, 2002
  16. Pemakalah pada Pertemuan Linguistik Utara 2, Pusat Bahasa Universitas Sumatra Utara, 2003
  17. Pemakalah pada Seminar dan Pelatihan Pembelajaran Bahasa Inggris dengan Komputer, FKIP Universitas Bung Hatta, 2004
  18. Peserta pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) V, 2004
  19. Pemakalah pada Semlok Metodologi Pembelajaran Tepat Guna, FKIP Universitas Bung Hatta, 2005
  20. Peserta pada ETS Professional Development Workshop: The Next Generation TOEFL Approach (Sponsored by ETS Princeton, New Jersey, 2005
  21. Peserta pada Seminar Pengembangan Aplikasi *High-Touch* dan *High-Tech* dalam Proses Pembelajaran di Sekolah, Pascasarjana UNP, 2005
  22. Nara Sumber pada Seminar Lokakarya Penyusunan Proposal Penelitian, STKIP PGRI Sumatra Barat, 2005

	<p><b>: Perjalanan dan Seminar Internasional</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studi Lanjut di Ohio University USA (Master)</li> <li>2. Program in English as a Second Language (University of Minnesota, 1981)</li> <li>3. Peserta pada Summer Meeting of Linguistics Society of America at the University of Maryland USA, 1982</li> <li>4. Peserta pada Third Eastern Conference of Austronesian Languages, at Ohio University, USA, 1982</li> <li>5. Pemakalah pada Konferensi Internasional II Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, 1996</li> <li>6. Pemakalah pada Konferensi Internasional III Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, 2000</li> <li>7. Peserta pada RELC International Seminar on Language Teaching, RELC SEAMEO, Singapore, 2002.</li> <li>8. Peserta pada RELC International Seminar on Language Teaching, RELC SEAMEO, Singapore, 2003</li> </ol> <p><b>Tim Pengembangan Pendidikan Tenaga Kependidikan (P2TK) DIKTI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Tim Studi Perluasan Mandat (SPM) Dikti, 2003</li> <li>2. Anggota Tim Studi Perluasan Mandat (SPM) Dikti, 2004</li> <li>3. Anggota Tim Kurikulum Konsektif PGSM Bidang Bahasa, 2004</li> <li>4. Anggota Tim Standar Kompetensi Guru, Dikti, 2004</li> </ol>
<p>11. Instruktur/Penatar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instruktur pada Southeast Asian Summer Studies Institute (SEASSI), Ohio University Amerika Serikat, 1982-1983</li> <li>2. Instruktur pada Cultural Awareness Project, Center for International Studies, Ohio University USA, 1983.</li> <li>3. Penatar pada LOKAKARYA PENELITIAN, Universitas Bung Hatta, 1997</li> <li>4. Penatar pada Semlok Pembuatan Tes dan Evaluasi, Universitas Bung Hatta, Padang, 1999</li> <li>5. Penatar pada Lokakarya Penulisan Proposal Penelitian, Jurusan bahasa Inggris FBSS UNP, 2000</li> <li>6. Penatar pada Lokakarya Evaluasi Materi Ajar English Intensive Course, Jurusan Bahasa Inggris</li> </ol>

ajutan Pasca Doktor

Hibah-hibah Penelitian yang pernah didapat

FBSS UNP, 2000

7. Penatar Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas bagi Guru-guru SMP dan SMA se Sumatera Barat, Dinas Pendidikan Sumatera barat, 2005
  8. Penatar Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas bagi Dosen-dosen PGSD UNP, 2005
  9. Penatar Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas bagi Dosen-dosen Perguruan Tinggi Kota Padang, 2005
- 
1. Pengembangan Keterampilan Menulis melalui Latihan Pengalihan *Genre* Wacana dan Jenis Teks (Jurnal Skolar Pasca Sarjana UNP, terakreditasi)
  2. Model Rancangan Materi *English for Specific Purposes (ESP)* Bidang Pariwisata Berdasarkan Kajian Kebutuhan (*Needs Assessment*) (Jurnal Forum Pendidikan UNP, terakreditasi)
  3. Pembentukan dan Pengembangan Sikap, Motivasi, dan Penguasaan Konsep-Konsep Penelitian Pendidikan melalui Pengenalan Materi dan Latihan yang Terdapat pada Media Internet (Jurnal Skolar Pascasarjana, UNP, terakreditasi);
  4. Peningkatan Motivasi, Berpikir Kritis, dan Intensitas Kerja Mahasiswa melalui *Computer Mediated Communication (CMC)* dan Pengajaran Supplemental (PS), (Jurnal Skolar Pascasarjana, UNP, terakreditasi)
- 
1. Hibah Pengajaran: Pengembangan Keterampilan Menulis melalui Latihan Pengalihan *Genre* Wacana dan Jenis Teks; dibiayai dengan dana Proyek Due-Like (1999-2000)
  2. Hibah Pengajaran: Model Rancangan Materi *English for Specific Purposes (ESP)* Bidang Pariwisata Berdasarkan Kajian Kebutuhan (*Needs Assessment*); dibiayai dengan dana Proyek Due-Like (2000-2001)
  3. Hibah Pengajaran: "Pembentukan dan Pengembangan Sikap, Motivasi, dan Penguasaan Konsep-Konsep Penelitian Pendidikan melalui Pengenalan Materi dan Latihan yang Terdapat pada Media Internet"; dibiayai dengan dana Proyek Due-Like (2001-2002)
  4. Hibah Pengajaran: "Peningkatan Motivasi, Berpikir Kritis, dan Intensitas Kerja Mahasiswa melalui *Computer Mediated Communication (CMC)* dan Pengajaran Supplemental (PS)", PTK dan PPKP (P2TK DIKTI), 2005

lain-lain (Pengalaman  
reviewer, Penghargaan,  
III)

**Pengalaman Menjadi Reviewer:**

1. Reviewer GBPP Program Strata I Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka, Jakarta, 1996
2. Penyunting Ahli pada Jurnal Forum Kependidikan, Universitas Sriwijaya, 1999-sekarang
3. Penyunting Ahli pada Jurnal Lingua, FKIP UNSRI, 2000-sekarang.
4. Evaluator/Reviewer Proposal Penelitian Dosen Muda, DP3M Direktorat Jenderal DIKTI, 2001
5. Ketua Dewan Penyunting Jurnal SKOLAR, Pasca Sarjana, 2001-sekarang
6. Penyunting Ahli pada Jurnal Bahasa dan Sastra, UPI Bandung, 2002-sekarang.

**Penghargaan:**

1. Dosen Teladan II, UNP, dari Rektor UNP, 1995
2. Pemenang Kompetisi Diskusi Tulis melalui E-mail/Mail List pada Virtual Forum of Language Teaching, RELC SEAMEO Singapore, 2002
3. Pemenang Diskusi Tulis melalui E-mail/Mail List pada Virtual Forum of Language Teaching, dari RELC SEAMEO Singapore, 2003
4. Satyalancana Karya Satya 30 Tahun dari Presiden RI, 2004

**Lain-lain:**

1. Pengurus Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing Internasional, 2000-2004

Padang,



Prof. Dr. H. Anas Yasin, M.A.  
NIP. 130 365 634

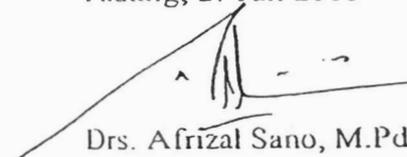
## CURICULUM VITAE

Nama : Drs. Afrizal Sano, M.Pd., Kons.  
NIP : 131 466 322  
Tempat / Tgl Lahir : Pekanbaru /  
Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III, d  
Jabatan : Lektor  
Pendidikan Terakhir : S2 Bimbingan Konseling, IKIP Bandung  
Alamat : Blok A 7 No.9 Komplek Singgalang, Kuaia Nyiur

### Pengalaman Penelitian:

No.	Judul	Tahun
1	Ekspektasi Guru dan Konselor tentang Pelaksanaan Layanan BK di Kotamadya Padang (Tesis S2)	1995
2	Uji-coba dan Pengembangan AUM-Umum Perguruan Tinggi di Beberapa LPTK di Indonesia	1996
3	Uji-coba dan Pengembangan AUM-PTSDL Perguruan Tinggi di Beberapa LPTK di Indonesia	1996
4	Tim Peneliti Aplikasi High-Tech and High Touch pada Proses Pembelajaran di Sekolah	2005

Padang, 27 Juli 2006



Drs. Afrizal Sano, M.Pd.Kons

## CURICULUM VITAE

Nama : Dr. Herman Nirwana, M.Pd., Kons.  
NIP : 131 764 228  
Tempat / Tgl Lahir : Talawi, Sawahlunto Sijunjung / 5 April 1962  
Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III.d  
Jabatan : Lektor Kepala  
Pendidikan terakhir : S3 Psikologi Pendidikan, Universitas Negeri Malang (2003)  
Alamat : Jln. Rondes No. 16, Belakang Kampus UNP II, Lubuk Buaya, Padang

### Pengalaman Penelitian:

No.	Judul	Tahun
1	Profil Masalah Mahasiswa IKIP Padang (anggota)	1992
2	Aspirasi dan Pendidikan dan Jabatan Pemuda Sumatera Barat (anggota)	1993
3	Persepsi Klien tentang Konseling, Keterampilan Komunikasi Konserlor dalam Konseling, dan Hubungan Keduanya dengan Pengungkapan Diri Klien (Tesis S2)	1998
4	Pengungkapan Diri ( <i>Self Disclosure</i> ) Mahasiswa (Anggota)	1999
5	Masalah-masalah yang Dialami Wanita Pedagang Kaki Lima di Sumatera Barat, dan Implikasinya pada Bimbingan (anggota)	1999
6	Hubungan Tingkat Aspirasi dan Persepsi tentang Belajar dengan Hasil Belajar Matematika Siswa Sekolah Menengah Umum yang Berlatar Belakang Budaya Minangkabau dan Batak (Disertasi S3)	2003

Padang, 27 Juli 2006



Dr. Herman Nirwana, M.Pd. Kons

## Curriculum Vitae

nama

nama : Drs. Mudjiran, M.S. Kons

tempat dan Tanggal Lahir : Yogyakarta, 09 Juni 1949

jenis kelamin : Laki-laki

agama : Islam

tempat kerja : Dosen Universitas Negeri Padang (UNP).

alamat : Kuala Nyiur I Blok. A no. 4. Pasir Nan Tigo, Koto  
Tengah, Kotamadya Padang (Kode Pos : 25172)

No. Telp. : (0751) 481783

### riwayat Pendidikan

Pendidikan	Spesialisasi	Ijazah Tahun	Tempat
SD Negeri	-	1963	Yogyakarta
SMP Muh.		1966	Yogyakarta
SPG Negeri		1969	Yogyakarta
Sarjana (S1)	BK	1976	IKIP Yogyakarta
Magister (2)	Psikologi	1988	UGM Yogyakarta
Pend. Profesi	Konselor	2001	Jurs. BK FIP UNPUNP
Prog. Doktor (S3)	Il. Pend.	Sedang menyelesaikan.	PPs. UNP di Padang

### riwayat Pekerjaan

Pangkat	Galangan	Berlaku t.m.	Surat Keputusan Nomor	Tanggal
Asisten Ahli Madya	III/a	1-3-1978	182/C.IIPT.37179	21-4-1979
Asisten Ahli	III/b	1-10-1980	2971C.1/PT.37/1981	2-6-1981
Lektor Muda	III/c	1-10-1982	91/C.UPT.3711983	26-1-1983
Lektor Madya	III/d	1-10-1984	137/C.UPT.37/1985	11-7-1985
Lektor	IV/a	1-4-1990	773911A.2.IV.1/CI1990	31-10-1990
Lektor Kepala Madya	IV/b	1-4-1994	6/K. Tahun 1995	28-4-1995
Lektor Kepala	IV/c	1-4-2003	14142/A2.7IKP/2003	31-3-2003

### pengalaman Jabatan

Nama Jabatan	Mulai dan Sampai
Pembantu Dekan III FIP IKP Padang	1979 - 1984
Kepala UPBK IKIP Padang	1990-1995
Ketua BPP IKIP Padang	1996-1998
Ketua Prodi Psikologi Jur. BK FIP UNP	2005 - Sek.

## **litian**

Jenis Kesulitan Belajar Yang Dialami Mahasiswa UNP th. 2002

Kajian Mengenai Lingkungan Keluarga dan Perawatan Alternatif Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Di Sumatera Barat th. 2003

Harapan Siswa SMA Sekolah Unggul dan SMA Sekolah Biasa Terhadap Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sumatera Barat th. 2004

## **giatan Seminar, antara lain:**

Seminar Internasional “ In-Country Cultura Experience” on the 23<sup>rd</sup> di Padang 2005

Seminar Internasional “An Insight into Global Education” on the 19<sup>th</sup> di Padang 2005

Menyajikan Makalah Hasil Penelitian dalam Kegiatan Semirata BKS PTN Wilayah Barat Bidang Ilmu Pendidikan di Universitas Bengkulu 6 Agustus 2005

Peserta Kologium Psikologi Nasional XVI “ Menuju Standarisasi Nasional Pendidikan Psikologi Indonesia” April 2006

## **rya Tulis Ilmiah antara lain:**

1. Jurnal Pembelajaran UNP ISSN 0216-0863 “Kesulitan Belajar yang Dialami Mahasiswa UNP” th. 2002
2. Bahan Ajar “Perkembangan Peserta Didik” (Mata kuliah MKK di UNP) th. 2003
3. Jurnal Pembelajaran UNP ISSN 0216-0863 “Harapan Siswa SMA Sekolah Unggul dan SMA Sekolah Biasa Terhadap Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sumatera Barat” th. 2005
4. Makalah Tentang “ Manajemen Stress” Disajikan dalam Diklat Pim III Regional Sumatera, th 2006

## **ngalaman Pelatihan Antara lain:**

1. Instruktur Workshop pada Kongres dan Konvensi IPBI Pusat di Bandar Lampung, 2001
2. Instruktur pada Konferda IPBI Sumatera Barat 2001
3. Instruktur Penataran/Latihan Kerja Guru BP/BK SLTP/SMU 1994 Regional I Wilayah Sumatera 2002
4. Fasilitator Bimbingan Konseling Kelompok Pemda Sumbar, 2001
5. Fasilitator Bimbingan Konseling Kelompok Rumah Sakit M. Djamil Padang, 2001

6. Fasilitator Bimbingan Konseling Kelompok Rumah Sakit Umum Pusat Stroke Bukittinggi, 2002
7. Fasilitator Bimbingan Konseling Kelompok Pemda Pesisir Selatan, 2001 – 2003
8. Fasilitator Bimbingan Konseling Kelompok Pemda Sumbar, 2001
9. Instruktur Bimbingan Diklat Pemda Sumbar, 2001
10. Fasilitator Trauma Konseling Aceh di Medan 2002
11. Fasilitator Trauma Konseling Aceh (Kerjasama dengan UM Malang) 2003
12. Instruktur Workshop Konvensi ABKIN di Bandung, 2003
13. Instruktur Diklat Pim III Propinsi Sumatera Barat 2000 – sekarang
14. Instruktur Diklat Pim III Regional Sumatera Barat 1997 – sekarang

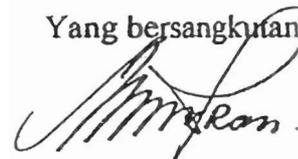
#### . Keorganisasian Profesi

1. Anggota Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia Sumbar 1989 – 2000
2. Anggota Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, 2001 – sekarang
3. Anggota Ikatan Pendidik Konselor Indonesia 1990 - sekarang
4. Anggota Ikatan Instrumentasi Bimbingan dan Konseling Indonesia 1995 – Sek.
5. Anggota Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia 1978 –sekarang

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan atas pengetahuan dan kepercayaan saya, menyatakan, bahwa data di atas mengenai kualifikasi dan pengalaman saya adalah benar, dan bila terjadi adanya penipuan saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Padang, 27 Juli 2006

Yang bersangkutan,



Drs. Mudjiran, M.S., Kons

NIP. 130687041

1. N a m a Dr. Marjohan, M.Pd., Kons.
2. Tpt/ Tgl. Lahir Minang Kabau, Tanah Datar/ 10 Maret 1956
3. Alamat Komplek Singgalang Blok A7 No. 5 Padang Telp. (0751) 481875
4. Pangkat/Jabatan Penata , lild/ Lektor
5. Jabatan 1. Dosen FIP UNP
6. Riwayat Pendidikan
1. SD, tamat tahun 1972, di Minangkabau, Batusangkar
  2. PGAN 4 Th, tamat 1974, di Batusangkar
  3. PGAN 6 Th, tamat 1976, di Batusangkar
  4. Sarjana Muda Bimb & Konseling, IKIP Padang, tamat tahun 1979
  5. Sarjana Bimb. & Konseling, IKIP Padang, tamat tahun 1982
  6. Magister Pendidikan Bimb. & Konseling IKIP Bandung, tamat tahun 1994
  7. Doktor, Uniuversity of Tasmania, tamat tahun 1998
  8. Pdd. Profesi Konselor UNP, tamat tahun 2001
7. Pengalaman Pekerjaan
1. Dosen Tetap Jurusan BK FIP UNP, 1983 s.d. sekarang
  2. Dosen Pasca sarjana UNP, 1998 s.d. sekarang
  3. Sekretaris Labor Jurusan Bimb. & Konseling FIP IKIP Padang, 1990-1992
  4. Sekretaris Unit Pelayanan Bimb dan Konseling UNP, 1985 s.d 1991
  5. Ketua Jurusan BK FIP UNP, 1999 s.d 2001
  6. Ketua Proyek JSCPD Universitas Negeri Padang, 1997 s.d 2001
  7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, tahun 2001 s.d 2004
8. Karya Ilmiah
1. Penulis buku; Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar, 1989
  2. Teknik-teknik Dasar Konseling, makalah, 1990
  3. Pokok-pokok pikiran tentang Konseling Perorangan, makalah, 1994
  4. Profesi Konseling sebagai Sistem, makalah, 1994
  5. Hubungan antara Pemahaman, Sikap Keprofesionalan dengan Pelayanan BK di SMA Kota Padang, Tesis, 1994
  6. Ekstasi dan Pemasalahannya, makalah, 1996
  7. Stress dan Upaya Penanggualangannya, makalah, 1996
  8. Educational Governace in Indonesia, makalah, 1996
  9. An Investigation of Self Esteem, Locus of Control and their Relationship to Factors that influence Decision Making Among Minangkabau Students (Disertasi) 1998
  10. Masalah Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, makalah, 1999
  11. Pengembangan Etos Kerja Karyawan, makalah, 2000
  12. Peran, Posisi, Kebijakan dan Upaya Dinas Pendidikan di Daerah dalam rangka Pendiikan Nasional, makalah, 2002
  13. Keberagaman layanan konseling dalam mengantisipasi masalah sosial, makalah, 2003
  14. Upaya Dinas Pendidikan Kota Padang dalam menyelamatkan terumbu karang, makalah, 2004
9. Kegiatan Penelitian.
1. Penelitian Guru Afektif, 1985
  2. Uji Coba Differential Aptitude Tes terhadap Siswa Sekolah Menengah Sumatera Barat, 1987
  3. Profil Jurusan PPB IKIP Padang, 1988
  4. Profil Program S1 Jurusan PPE FIP IKIP Padang, 1992
  5. Pertumbuhan Kemampuan Profesional Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Jurusan PPB FIP IKIP Padang, 1992
  6. Studi Efektivitas Program Student Support Services and

2000.

7. Studi Mahasiswa dengan Skor *Entry Level Assesment* Rendah di LPTK Negeri, 2001.

10. Kegiatan Ilmiah  
Yang Diikuti

1. Loka karya Pelayanan BK Mahasiswa, 1985
2. Peserta Konvensi IPBI, 1989 di Denpasar
3. Seminar 3 S Proyek PGSM Batch I, 1998 di Bandung
4. Seminar ELAQA Proyek PGSM, 1998 di Bogor
5. Seminar CPD proyek PGSM Batch I, 1998 di Bogor
6. Seminar ELAQA Proyek PGSM, 1999 di Bogor
7. Seminar 3 S Proyek PGSM Batch II, 1999 di Surabaya
8. Seminar CPD proyek PGSM Batch II, 1999 di Semarang
9. Seminar 3 S Proyek PGSM Batch III, 2000 di Cipanas
10. Seminar CPD proyek PGSM Batch II, 1999 di Denpasar
11. Peserta Konvensi Asosiasi Bimbingan dan Konseling (ABKIN) 2003 di Bandung
12. Peserta Kongres dan Konvensi Asosiasi Bimbingan dan Konseling (ABKIN), 2005, di Semarang.
13. Peserta International Conference on Counselling, 2006 di Brisbane, Australia

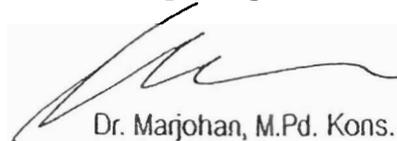
11. Pendidikan dan  
Pelatihan

1. Akta V, 1985
2. Peserta Labian kepemimpinan, 1977
3. Peserta pelatihan Bahasa Inggris 1983
4. Peserta pelatihan *Qualitative Resarch*, 1983
5. Peserta pelatihan *Pengembangan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan*, 1985
6. Peserta pelatihan *Manajemen Keuangan*, 1983

12. Pengalaman  
Melakukan  
Praktek  
Bimbingan dan  
Konseling

1. Konseling dengan klien UPBK IKIP/UNP Padang, 1985 s.d sekarang
2. Melaksanakan konseling dengan sejumlah klien dengan "praktek pribadi"
3. Melaksanakan konseling Kelompok dengan:
  - a. Pegawai Golongan I dan II Pemda Propinsi Sumatera Barat tahun 1999
  - b. Pejabat dan Calon pejabat eselon IV dan V Selingkungan Pemda Sumatera Barat tahun 1999
  - c. Peserta Adumla pegawai Pemda Sumatera Barat tahun 1999
  - d. Peserta SPAMA pegawai Pemda Sumatera Barat, 1999
  - e. Pegawai Universitas Bung Hatta Padang tahun 2000
4. Melaksanakan konseling Lintas Budaya di Pasaman tahun 2001
5. Melaksanakan tes seleksi calon karyawan Bank Pembangunan Sumatera Barat, 1998 s.d 2001.
6. Melaksanakan tes seleksi calon karyawan Bank BNI Cabang Padang
7. Melaksanakan tes seleksi calon dosen Universitas Negeri Padang, 1999-2001
8. Pelaksana sejumlah tes penjurusan di SMU-SMU di Sumatera Barat
9. Ketua pelaksana Psiko Tes dalam Rangka Pengisian Struktur Baru Pemerintah Kota Bukittinggi, 2001

Padang, 10 Agustus, 2006.



Dr. Marjohan, M.Pd. Kons.  
NIP. 130 905 638



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
**LEMBAGA PENELITIAN**

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25131 Telp. (0751) 443450,  
Operator 7051260, 7058691 Pes. 213 Fax. 443450, 7055628 E-mail : lpunp@telkom.net

Nomor : 610/J.41.2./PG/2006  
Lamp. : -  
Hal : *Izin Penelitian*

2 November 2006

Yth. : **Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Padang  
Padang**

Sehubungan dengan permohonan Peneliti Universitas Negeri Padang tanggal 1 November 2006, perihal seperti pokok surat, dengan ini kami mohon kiranya Saudara memberi izin kepada nama :

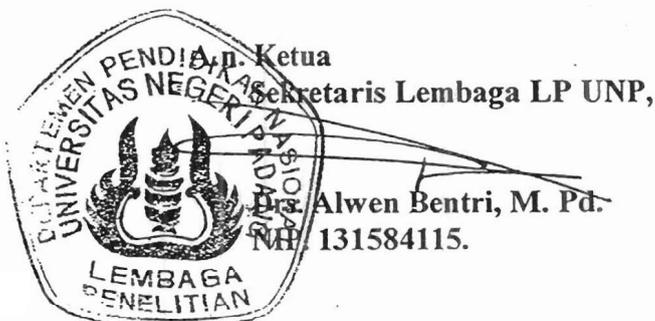
Ketua Peneliti : Nama : Drs. Alwen Bentri, M. Pd NIP. 131584115

Anggota Peneliti : 1. Prof. Dr. H. Anas Yasin, M.A NIP. 130365634  
2. Dr. Marjohan, M. Pd, Kons NIP. 130905638  
3. Drs. Afrizal Sano, M. Pd, Kons. NIP. 131466322  
4. Dr. Herman Nirwana, M. Pd, Kons NIP. 131764228  
5. Drs. Mujiran, M.S, Kons NIP. 130687041

Untuk mengumpulkan data penelitian :

Judul : Efektifitas Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Sumatera Barat.  
Lokasi : Kota Padang dan Kabupaten Lima Puluh Kota  
Waktu : 3 s/d 15 November 2006

Atas bantuan dan kerjasama Saudara, kami sampai terima kasih.



**Tembusan :**

- Rektor Universitas Negeri Padang
- Bapak Wali Kota Padang
- Bapak Bupati Lima Puluh Kota



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
LEMBAGA PENELITIAN**

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25131 Telp. (0751) 443450,  
Operator 7051260, 7058691 Pes. 213 Fax. 443450, 7055628 E-mail : lpunp@telkom.net

Nomor : 610/J.41.2/PG/2006  
Lamp. : -  
Hal : *Izin Penelitian*

2 November 2006

**Yth. : Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Payakumbuh**

Sehubungan dengan permohonan Peneliti Universitas Negeri Padang tanggal 1 November 2006, perihal seperti pokok surat, dengan ini kami mohon kiranya Saudara memberi izin kepada nama :

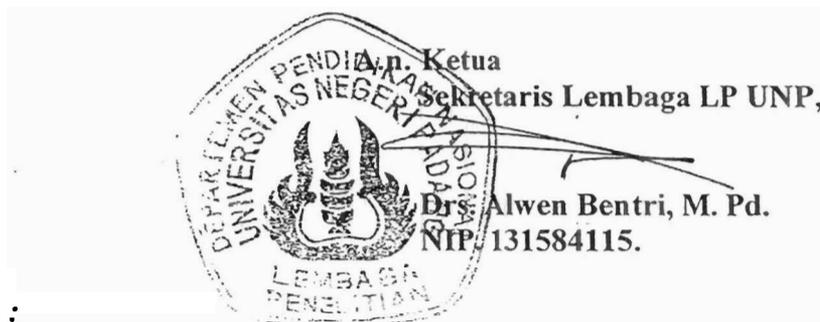
Ketua Peneliti : Nama : Drs. Alwen Bentri, M. Pd NIP. 131584115

Anggota Peneliti : 1. Prof. Dr. H. Anas Yasin, M.A NIP. 130365634  
2. Dr. Marjohan, M. Pd, Kons NIP. 130905638  
3. Drs. Afrizal Sano, M. Pd, Kons. NIP. 131466322  
4. Dr. Herman Nirwana, M. Pd, Kons NIP. 131764228  
5. Drs. Mujiran, M.S, Kons NIP. 130687041

Untuk mengumpulkan data penelitian :

Judul : Efektifitas Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Sumatera Barat.  
Lokasi : Kota Padang dan Kabupaten Lima Puluh Kota  
Waktu : 3 s/d 15 November 2006

Atas bantuan dan kerjasama Saudara, kami sampai terima kasih.



**Tembusan :**

- Rektor Universitas Negeri Padang
- Bapak Wali Kota Padang
- Bapak Bupati Lima Puluh Kota

## FORMAT ISIAN DOKUMEN

Jumlah Anak, APK, APM, Jumlah Lulusan, Anak Putus Sekolah SD/MI dan SM/MTs di Sumatera Barat tahun 2004 dan 2005

No	Unsur	Satuan Pendidikan			
		SD/MI (7-12)		SMP/MTs	
		2004	2005	2004	2005
1	Jumlah Anak				
2	APK				
3	APM				
4	Lulusan				
5	Putus Sekolah				

## ANGKET UNTUK SISWA

### Petunjuk Pengisian

Berikut ini dikemukakan sejumlah pertanyaan berkenaan dengan pengalaman anda sewaktu belajar di sekolah selama di Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP). Jawablah pertanyaan tersebut secara jujur sebagaimana adanya. Jawaban anda tersebut akan dijamin kerahasiaannya. Terimakasih atas kerjasama anda!

1. Jenis kelamin :  a. laki-laki  
 b. Perempuan
  2. Umur  a. kurang dari 10 tahun  
 b. antara 11 sampai dengan 12 tahun  
 c. antara 13 sampai dengan 15 tahun  
 d. di atas 15 tahun
  3. Sebelum putus dari sekolah saya pernah belajar di  
 Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah  
Masuk Tahun ..... Keluar tahun .....
  - SMP atau MTS  
Masuk Tahun ..... Keluar tahun .....
4. Lama belajar
- Di SD atau MI : ..... tahun
- Di SMP atau Tsanawiyah ..... tahun
5. Kemauan saya untuk belajar sebetulnya adalah:
- a. Tinggi sekali
- b. Tinggi
- c. Cukup Tinggi
- d. Kurang
- e. Kurang sekali

6. Kemampuan saya sebenarnya dalam belajar , jika dibandingkan atau melihat teman sekelas adalah :

- a. di atas dari teman
- b. sama dengan teman
- c. di bawah teman

7. Saya putus sekolah karena hal-hal berikut ini:

- a. Kekurangan biaya
- b. Tidak ada yang akan membiayai saya lagi
- c. Orang tua meminta saya untuk berhenti sekolah
- d. Guru memarahi saya
- e. di dikeluarkan oleh sekolah karena melanggar disiplin atau melakukan tindakan kriminal
- e. Teman-teman mengganggu saya
- f. Pelajaran tidak saya pahami
- g. Teman-teman banyak yang tidak bersekolah
- h. Saya takut ke sekolah karena di perjalanan saya diganggu oleh orang lain
- i. lain-lain yaitu.....

8. Menurut pemikiran saya sekolah itu:

- a. Sangat bermanfaat untuk masa depan saya
- b. Tidak ada kaitannya dengan masa depan saya
- c. Menghabiskan banyak uang dan waktu
- d. Diajar oleh guru-guru yang keras
- e. Jaraknya dengan rumah saya amat jauh
- f. Ditujukan untuk anak-anak yang mampu ekonominya
- g. Lain-lain, yaitu .....

9. Cita-cita saya adalah

- a. Ingin menjadi dokter, hakim atau insinyur
- b. Ingin menjadi polisi, tentara atau sejenisnya
- c. Ingin menjadi pedagang
- d. Ingin menjadi petani, nelayan

- e. Ingin menjadi supir, pilot atau pramugara/i
- f. Ingin bekerja di perusahaan swasta
- g. Ingin menjadi guru
- h. Lain-lain yaitu,.....

10. Bila ada kesempatan dan biaya, maka saya:

- a. dengan kesadaran sendiri ingin sekolah
- b. akan sekolah lagi jika disuruh oleh orang tua
- c. tidak akan sekolah lagi karena malu dengan teman
- d. Lain-lain, yaitu,.....

11. Kondisi/Kegiatan saya sekarang:

- a. Bekerja sebagai petani, nelayan atau pedagang kecil-kecilan
- b. Bekerja bila ada yang memberi pekerjaan
- c. Membantu orang tua
- d. Belum bekerja sama sekali

**PEDOMAN WAWANCARA  
Untuk Orang Tua**

1. Kondisi keluarga

- a. Jumlah anak : ..... orang. Usia : SD: .....; SLP:.....
- b. Pekerjaan Ayah: .....
- c. Pekerjaan Ibu .....
- d. Tinggal bersama Ayah saja: Ya/Tidak
- e. Tinggal bersama Ibu saja: Ya/Tidak
- f. Tinggal bersama kedua orang tua: Ya/Tidak
- g. Tinggal bersama famili/orang lain/Panti asuhan: Ya/Tidak

2. Kondisi sosial ekonomi orang tua

- a. Penghasilan perbulan :
  - < Rp. 500.000,-
  - Rp. 500.000,- - Rp. 1000.000,-
  - > Rp. 1000.000,-
- b. Sumber penghasilan orang tua:
  - .....
  - .....
  - .....

3. Kondisi kemauan dan kemampuan belajar anak.

- a. Sekolah atas kemauannya sendiri
- b. Anak rajin masuk sekolah
- c. Anak jarang masuk sekolah, karena .....
- d. Anak tidak mau masuk sekolah, karena .....
- e. Sekarang putus sekolah, ada kemauan untuk sekolah lagi tetapi biaya tidak ada
- f. Sekarang putus sekolah karena membantu orang tua mencari nafkah
- g. Sekarang putus sekolah karena bergantian dengan saudaranya yang lain, sebab biaya tidak cukup.
- h. Sekarang putus sekolah, karena kemampuan otaknya lemah

- i. Selama bersekolah prestasi belajarnya tinggi
  - j. Selama bersekolah prestasi belajarnya rendah terus
  - k. Selama bersekolah buku dan alat-alat pelajarannya tidak lengkap, karena tidak punya uang untuk membelinya.
4. Perilaku dan cita-cita pendidikan anak, menurut orang tua.
- a. Selama bersekolah perilakunya baik-baik saja
  - b. Selama sekolah orang tua sering dipanggil oleh pihak sekolah karena nakal/ sering bolos/ nilainya rendah
  - c. Anak mempunyai cita-cita untuk bersekolah sampai pada jenjang yang tinggi (kuliah)
  - d. Anak tidak mempunyai cita-cita yang jelas.
5. Kondisi anak sekarang
- a. Anak masih terus masuk sekolah pada tingkat:      a. SD      b. SLP.
  - b. Anak sekarang putus sekolah
  - c. Anak sekarang masih sekolah tetapi sering tidak masuk, karena .....
6. Pandangan terhadap sekolah
- a. Sekolah itu sangat penting untuk masa depan yang lebih baik
  - b. Sekolah itu tidak penting karena setelah tamat juga sulit cari pekerjaan
  - c. Tidak sekolahpun juga dapat hidup mewah
  - d. Sekolah hanyalah untuk orang-orang yang punya duit saja
  - e. Kalau sekolah tidak dapat membantu orang tua bekerja mencari nafkah
  - f. Sekolah biayanya sangat mahal
  - g. Pemerintah tidak mau membantu biaya bagi anak yang orang tuanya miskin
  - h. Sekolah tempatnya jauh dan tidak ada kendaraan untuk berangkat ke sekolah
  - i. Di daerah ini kebanyakan anak-anak hanya tamat SD saja
  - j. Di daerah ini belum ada sekolah tingkat SLTP (ada tetapi jauh sekali)

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**Untuk Kepala Sekolah**

**A. Identitas Responden:**

1. Pekerjaan Responden: Kepala Sekolah .....

2. Lama Menduduki Jabatan Sekarang:
- a. < 1 tahun
  - b. 1 – 2 tahun
  - c. 2 – 3 tahun
  - d. 3 – 4 tahun
  - e. > 4 tahun

**B. Pertanyaan:**

1. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di sekolah:
  - a. tidak lengkap, misalnya.....
  - b. lengkap
  - c. sangat lengkap
2. Apa usaha yang Bapak/Ibu lakukan untuk melengkapi sarana dan prasarana tersebut:
  - a. Minta bantuan kepada orang tua siswa melalui rapat komite sekolah
  - b. Minta bantuan kepada pemerintah
  - c. Minta bantuan kepada alumni
  - d. Minta bantuan kepada pengusaha
  - e. ....
3. Apa kendala yang Bapak/Ibu temui dalam melengkapi sarana dan prasarana sekolah .....
4. Usaha yang dilakukan untuk mencegah anak putus sekolah:
  - a. Membebaskan uang SPP
  - b. Membebaskan uang masuk
  - c. Memberikan beasiswa
  - d. Mencarikan orang tua asuh
  - e. ....
5. Upaya pemerintah daerah mendorong siswa untuk masuk SD/SMP:
  - a. Mensosialisasikan kebijakan/program W-9-T
  - b. Membangun unit sekolah baru (USB)
  - c. Membangun SLTP satu atap
  - d. Menyelenggarakan SMP Terbuka
  - e. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada masyarakat untuk membangun sekolah baru (sekolah dan madrasah/pesantren)

6. Upaya masyarakat dalam usaha menyukseskan kegiatan W-9-T:
  - a. Mewakafkan tanah untuk membangun sekolah baru
  - b. Gotong royong membangun sekolah
  - c. Mencari donatur
  - d. ....
  
7. Kendala yang Bapak/Ibu temui dalam usaha menyukseskan kegiatan W-9-T di sekolah yang menjadi tanggung jawab Bapak/Ibu? .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
  
8. Menurut Bapak/Ibu apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyukseskan W-9-T? .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
  
9. Menurut Bapak/Ibu apa yang menyebabkan mereka harus ke luar dari sekolah:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  
10. Jika dilihat pada orangtua siswa, menurut Bpk/Ibu ekonomi orangtua di daerah kerja Bpk./Ibu bisa menjadi penyebab anak-anak mereka putus sekolah?
  - a. Ya
  - b. Tidak
 Alasannya .....  
 .....  
 .....
  
11. Menurut Bpk./Ibu faktor apa lagi (yang bersumber dari orang tua) yang menyebabkan anak-anak mereka tidak tamat sekolah?
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....

12. Apakah kondisi sekolah (jumlah ruangan dan keadaan bangunan) sudah memadai untuk menampung anak-anak untuk bersekolah?
- a. Sudah Memadai
  - b. Belum Memadai

Alasannya: .....

.....

.....

.....

13. Apa usulan Bpk/Ibu untuk memperbaiki kondisi sekolah?
- a. ....
  - b. ....
  - c. ....

14. Apa saja kebijakan pemerintah yang Bapak/Ibu ketahui untuk menyukseskan kegiatan W-9-T?
- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  - e. ....
  - f. ....

15. Sumber pembiayaan pendidikan:
- a. Pemerintah pusat
  - b. Pemerintah daerah
  - c. Swadaya masyarakat
  - d. ....

16. Apa pendapat Bpk/ibu tentang kebijakan pemerintah tersebut?
- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  - e. ....

17. Apa saran Bapak/Ibu agar W-9-T bisa terlaksana dan tercapai secara baik?
- a. Kepada pemerintah .....
  - b. Kepada orangtua .....
  - c. Kepada tokoh masyarakat .....
  - d. Kepada ninik mamak .....
  - e. dll

18. Bagi anak-anak yang tidak tamat sekolah, mereka bisa mengikuti pendidikan dan mendapatkan ijazah **Paket A** dan atau **Paket B**, apa komentar Bpk/Ibu tentang peran kelompok belajar tersebut untuk menyukseskan W-9-T? .....

.....  
.....  
.....

19. Lembaga pendidikan yang ada di sekitar ini:

- a. Pesantren
- b. Madrasah Ibtidaiyah/Tsanawiyah
- c. SMP Terbuka
- d. ....

•

**PEDOMAN WAWANCARA  
Untuk Komite Sekolah**

**A. Identitas Responden:**

1. Pekerjaan Responden: Komite Sekolah .....
  
2. Lama Menduduki Jabatan Sekarang:
  - a. < 1 tahun
  - b. 1 – 2 tahun
  - c. 2 – 3 tahun
  - d. 3 – 4 tahun
  - e. > 4 tahun

**B. Pertanyaan:**

1. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di sekolah:
  - a. tidak lengkap, misalnya.....
  - b. lengkap
  - c. sangat lengkap
2. Apa usaha yang Bapak/Ibu lakukan untuk melengkapi sarana dan prasarana tersebut:
  - a. Minta bantuan kepada orang tua siswa melalui rapat komite sekolah
  - b. Minta bantuan kepada pemerintah
  - c. Minta bantuan kepada alumni
  - d. Minta bantuan kepada pengusaha
  - e. ....
3. Apa kendala yang Bapak/Ibu temui dalam melengkapi sarana dan prasarana sekolah .....
  
4. Usaha yang dilakukan untuk mencegah anak putus sekolah:
  - a. Membebaskan uang SPP
  - b. Membebaskan uang masuk
  - c. Memberikan beasiswa
  - d. Mencarikan orang tua asuh
  - e. ....
5. Upaya pemerintah daerah mendorong siswa untuk masuk SD/SMP:
  - a. Mensosialisasikan kebijakan/program W-9-T
  - b. Membangun unit sekolah baru (USB)
  - c. Membangun SLTP satu atap
  - d. Menyelenggarakan SMP Terbuka
  - e. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada masyarakat untuk membangun sekolah baru (sekolah dan madrasah/pesantren)

6. Upaya masyarakat dalam usaha menyukseskan kegiatan W-9-T:
  - a. Mewakafkan tanah untuk membangun sekolah baru
  - b. Gotong royong membangun sekolah
  - c. Mencari donatur
  - d. ....
  
7. Kendala yang Bapak/Ibu temui dalam usaha menyukseskan kegiatan W-9-T di sekolah yang menjadi tanggung jawab Bapak/Ibu? .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
  
8. Menurut Bapak/Ibu apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyukseskan W-9-T? .....  
 .....  
 .....  
 .....
  
9. Menurut Bapak/Ibu apa yang menyebabkan mereka harus ke luar dari sekolah:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  
10. Jika dilihat pada orangtua siswa, menurut Bpk/Ibu ekonomi orangtua di daerah kerja Bpk./Ibu bisa menjadi penyebab anak-anak mereka putus sekolah?
  - a. Ya
  - b. Tidak
 Alasannya .....  
 .....  
 .....
  
11. Menurut Bpk./Ibu faktor apa lagi (yang bersumber dari orang tua) yang menyebabkan anak-anak mereka tidak tamat sekolah?
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....

12. Apakah kondisi sekolah (jumlah ruangan dan keadaan bangunan) sudah memadai untuk menampung anak-anak untuk bersekolah?

- a. Sudah Memadai
- b. Belum Memadai

Alasannya: .....

.....  
.....

13. Apa usulan Bpk/Ibu untuk memperbaiki kondisi sekolah?

- a. ....
- b. ....
- c. ....

14. Apa saja kebijakan pemerintah yang Bapak/Ibu ketahui untuk menyukkseskan kegiatan W-9-T?

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....
- f. ....

15. Sumber pembiayaan pendidikan:

- a. Pemerintah pusat
- b. Pemerintah daerah
- c. Swadaya masyarakat
- d. ....

16. Apa pendapat Bpk/ibu tentang kebijakan pemerintah tersebut?

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....

17. Apa saran Bapak/Ibu agar W-9-T bisa terlaksana dan tercapai secara baik?

- a. Kepada pemerintah .....
- b. Kepada orangtua .....
- c. Kepada tokoh masyarakat .....
- d. Kepada ninik mamak .....
- e. dll

18. Bagi anak-anak yang tidak tamat sekolah, mereka bisa mengikuti pendidikan dan mendapatkan ijazah **Paket A** dan atau **Paket B**, apa komentar Bpk/Ibu tentang peran kelompok belajar tersebut untuk menyukkseskan W-9-T? .....

.....  
.....  
.....

19. Lembaga pendidikan yang ada di sekitar ini:

- a. Pesantren
- b. Madrasah Ibtidaiyah/Tsanawiyah
- c. SMP Terbuka
- d. ....



6. Upaya masyarakat dalam usaha menyukseskan kegiatan W-9-T:
  - a. Mewakafkan tanah untuk membangun sekolah baru
  - b. Gotong royong membangun sekolah
  - c. Mencari donatur
  - d. ....
  
7. Kendala yang Bapak/Ibu temui dalam usaha menyukseskan kegiatan W-9-T di sekolah yang menjadi tanggung jawab Bapak/Ibu? .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
  
8. Menurut Bapak/Ibu apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyukseskan W-9-T? .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
  
9. Menurut Bapak/Ibu apa yang menyebabkan mereka harus ke luar dari sekolah:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  
10. Jika dilihat pada orangtua siswa, menurut Bpk/Ibu ekonomi orangtua di daerah kerja Bpk./Ibu bisa menjadi penyebab anak-anak mereka putus sekolah?
  - a. Ya
  - b. Tidak
 Alasannya .....  
 .....  
 .....
  
11. Menurut Bpk./Ibu faktor apa lagi (yang bersumber dari orang tua) yang menyebabkan anak-anak mereka tidak tamat sekolah?
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....

12. Apakah kondisi sekolah (jumlah ruangan dan keadaan bangunan) sudah memadai untuk menampung anak-anak untuk bersekolah?
- a. Sudah Memadai
  - b. Belum Memadai

Alasannya: .....

.....

.....

.....

13. Apa usulan Bpk/Ibu untuk memperbaiki kondisi sekolah?

- a. ....
- b. ....
- c. ....

14. Apa saja kebijakan pemerintah yang Bapak/Ibu ketahui untuk menyukseskan kegiatan W-9-T?

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....
- f. ....

15. Sumber pembiayaan pendidikan:

- a. Pemerintah pusat
- b. Pemerintah daerah
- c. Swadaya masyarakat
- d. ....

16. Apa pendapat Bpk/ibu tentang kebijakan pemerintah tersebut?

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....

17. Apa saran Bapak/Ibu agar W-9-T bisa terlaksana dan tercapai secara baik?

- a. Kepada pemerintah .....
- b. Kepada orangtua .....
- c. Kepada tokoh masyarakat .....
- d. Kepada ninik mamak .....
- e. dll

18. Bagi anak-anak yang tidak tamat sekolah, mereka bisa mengikuti pendidikan dan mendapatkan ijazah **Paket A** dan atau **Paket B**, apa komentar Bpk/Ibu tentang peran kelompok belajar tersebut untuk menyukseskan W-9-T? .....

.....  
.....  
.....

19. Lembaga pendidikan yang ada di sekitar ini:

- a. Pesantren
- b. Madrasah Ibtidaiyah/Tsanawiyah
- c. SMP Terbuka
- d. ....

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota**

**A. Identitas Responden:**

1. Pekerjaan Responden: Dinas Pendidikan Kab/Kota.....
  
2. Lama Menduduki Jabatan Sekarang:
  - a. < 1 tahun
  - b. 1 – 2 tahun
  - c. 2 – 3 tahun
  - d. 3 – 4 tahun
  - e. > 4 tahun

**B. Pertanyaan:**

1. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di sekolah:
  - a. tidak lengkap, misalnya.....
  - b. lengkap
  - c. sangat lengkap
2. Apa usaha yang Bapak/Ibu lakukan untuk melengkapi sarana dan prasarana tersebut:
  - a. Minta bantuan kepada orang tua siswa melalui rapat komite sekolah
  - b. Minta bantuan kepada pemerintah
  - c. Minta bantuan kepada alumni
  - d. Minta bantuan kepada pengusaha
  - e. ....
3. Apa kendala yang Bapak/Ibu temui dalam melengkapi sarana dan prasarana sekolah .....
  
4. Usaha yang dilakukan untuk mencegah anak putus sekolah:
  - a. Membebaskan uang SPP
  - b. Membebaskan uang masuk
  - c. Memberikan beasiswa
  - d. Mencarikan orang tua asuh
  - e. ....
5. Upaya pemerintah daerah mendorong siswa untuk masuk SD/SMP:
  - a. Mensosialisasikan kebijakan/program W-9-T
  - b. Membangun unit sekolah baru (USB)
  - c. Membangun SLTP satu atap
  - d. Menyelenggarakan SMP Terbuka
  - e. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada masyarakat untuk membangun sekolah baru (sekolah dan madrasah/pesantren)

6. Upaya masyarakat dalam usaha menyukseskan kegiatan W-9-T:
- Mewakafkan tanah untuk membangun sekolah baru
  - Gotong royong membangun sekolah
  - Mencari donatur
  - .....
7. Kendala yang Bapak/Ibu temui dalam usaha menyukseskan kegiatan W-9-T di sekolah yang menjadi tanggung jawab Bapak/Ibu? .....
- .....
- .....
- .....
- .....
8. Menurut Bapak/Ibu apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyukseskan W-9-T? .....
- .....
- .....
- .....
- .....
9. Menurut Bapak/Ibu apa yang menyebabkan mereka harus ke luar dari sekolah:
- .....
  - .....
  - .....
  - .....
10. Jika dilihat pada orangtua siswa, menurut Bpk/Ibu ekonomi orangtua di daerah kerja Bpk./Ibu bisa menjadi penyebab anak-anak mereka putus sekolah?
- Ya
  - Tidak
- Alasannya .....
- .....
- .....
11. Menurut Bpk./Ibu faktor apa lagi (yang bersumber dari orang tua) yang menyebabkan anak-anak mereka tidak tamat sekolah?
- .....
  - .....
  - .....
  - .....

12. Apakah kondisi sekolah (jumlah ruangan dan keadaan bangunan) sudah memadai untuk menampung anak-anak untuk bersekolah?

- a. Sudah Memadai
- b. Belum Memadai

Alasannya: .....

.....

.....

.....

13. Apa usulan Bpk/Ibu untuk memperbaiki kondisi sekolah?

- a. ....
- b. ....
- c. ....

14. Apa saja kebijakan pemerintah yang Bapak/Ibu ketahui untuk menyukseskan kegiatan W-9-T?

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....
- f. ....

15. Sumber pembiayaan pendidikan:

- a. Pemerintah pusat
- b. Pemerintah daerah
- c. Swadaya masyarakat
- d. ....

16. Apa pendapat Bpk/ibu tentang kebijakan pemerintah tersebut?

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....

17. Apa saran Bapak/Ibu agar W-9-T bisa terlaksana dan tercapai secara baik?

- a. Kepada pemerintah .....
- b. Kepada orangtua .....
- c. Kepada tokoh masyarakat .....
- d. Kepada ninik mamak .....
- e. dll

18. Bagi anak-anak yang tidak tamat sekolah, mereka bisa mengikuti pendidikan dan mendapatkan ijazah **Paket A** dan atau **Paket B**, apa komentar Bpk/Ibu tentang peran kelompok belajar tersebut untuk menyukseskan W-9-T? .....

.....  
.....  
.....

19. Lembaga pendidikan yang ada di sekitar ini:

- a. Pesantren
- b. Madrasah Ibtidaiyah/Tsanawiyah
- c. SMP Terbuka
- d. ....

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**Untuk Dewan Pendidikan Kab/Kota**

**A. Identitas Responden:**

1. Pekerjaan Responden: Dewan Pendidikan Kab/Kota .....
2. Lama Menduduki Jabatan Sekarang:
  - a. < 1 tahun
  - b. 1 – 2 tahun
  - c. 2 – 3 tahun
  - d. 3 – 4 tahun
  - e. > 4 tahun

**B. Pertanyaan:**

1. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di sekolah:
  - a. tidak lengkap, misalnya.....
  - b. lengkap
  - c. sangat lengkap
2. Apa usaha yang Bapak/Ibu lakukan untuk melengkapi sarana dan prasarana tersebut:
  - a. Minta bantuan kepada orang tua siswa melalui rapat komite sekolah
  - b. Minta bantuan kepada pemerintah
  - c. Minta bantuan kepada alumni
  - d. Minta bantuan kepada pengusaha
  - e. ....
3. Apa kendala yang Bapak/Ibu temui dalam melengkapi sarana dan prasarana sekolah .....
4. Usaha yang dilakukan untuk mencegah anak putus sekolah:
  - a. Membebaskan uang SPP
  - b. Membebaskan uang masuk
  - c. Memberikan beasiswa
  - d. Mencarikan orang tua asuh
  - e. ....
5. Upaya pemerintah daerah mendorong siswa untuk masuk SD/SMP:
  - a. Mensosialisasikan kebijakan/program W-9-T
  - b. Membangun unit sekolah baru (USB)
  - c. Membangun SLTP satu atap
  - d. Menyelenggarakan SMP Terbuka
  - e. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada masyarakat untuk membangun sekolah baru (sekolah dan madrasah/pesantren)

6. Upaya masyarakat dalam usaha menyelesaikan kegiatan W-9-T:
- Mewakafkan tanah untuk membangun sekolah baru
  - Gotong royong membangun sekolah
  - Mencari donatur
  - .....
7. Kendala yang Bapak/Ibu temui dalam usaha menyelesaikan kegiatan W-9-T di sekolah yang menjadi tanggung jawab Bapak/Ibu? .....
- .....
- .....
- .....
- .....
8. Menurut Bapak/Ibu apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan W-9-T? .....
- .....
- .....
- .....
- .....
9. Menurut Bapak/Ibu apa yang menyebabkan mereka harus ke luar dari sekolah:
- .....
  - .....
  - .....
  - .....
10. Jika dilihat pada orangtua siswa, menurut Bpk/Ibu ekonomi orangtua di daerah kerja Bpk./Ibu bisa menjadi penyebab anak-anak mereka putus sekolah?
- Ya
  - Tidak
- Alasannya .....
- .....
- .....
11. Menurut Bpk./Ibu faktor apa lagi (yang bersumber dari orang tua) yang menyebabkan anak-anak mereka tidak tamat sekolah?
- .....
  - .....
  - .....
  - .....

12. Apakah kondisi sekolah (jumlah ruangan dan keadaan bangunan) sudah memadai untuk menampung anak-anak untuk bersekolah?

- a. Sudah Memadai
- b. Belum Memadai

Alasannya: .....

.....

.....

.....

13. Apa usulan Bpk/Ibu untuk memperbaiki kondisi sekolah?

- a. ....
- b. ....
- c. ....

14. Apa saja kebijakan pemerintah yang Bapak/Ibu ketahui untuk menyukkseskan kegiatan W-9-T?

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....
- f. ....

15. Sumber pembiayaan pendidikan:

- a. Pemerintah pusat
- b. Pemerintah daerah
- c. Swadaya masyarakat
- d. ....

16. Apa pendapat Bpk/ibu tentang kebijakan pemerintah tersebut?

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....

17. Apa saran Bapak/Ibu agar W-9-T bisa terlaksana dan tercapai secara baik?

- a. Kepada pemerintah .....
- b. Kepada orangtua .....
- c. Kepada tokoh masyarakat .....
- d. Kepada ninik mamak .....
- e. dll

18. Bagi anak-anak yang tidak tamat sekolah, mereka bisa mengikuti pendidikan dan mendapatkan ijazah **Paket A** dan atau **Paket B**, apa komentar Bpk/Ibu tentang peran kelompok belajar tersebut untuk menyukseskan W-9-T? .....

.....  
.....  
.....

19. Lembaga pendidikan yang ada di sekitar ini:

- a. Pesantren
- b. Madrasah Ibtidaiyah/Tsanawiyah
- c. SMP Terbuka
- d. ....

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**Untuk Dinas Pendidikan Provinsi**

**A. Identitas Responden:**

1. Pekerjaan Responden: Dinas Pendidikan Provinsi.....

2. Lama Menduduki Jabatan Sekarang:
- a. < 1 tahun
  - b. 1 – 2 tahun
  - c. 2 – 3 tahun
  - d. 3 – 4 tahun
  - e. > 4 tahun

**B. Pertanyaan:**

1. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di sekolah:
  - a. tidak lengkap, misalnya.....
  - b. lengkap
  - c. sangat lengkap
2. Apa usaha yang Bapak/Ibu lakukan untuk melengkapi sarana dan prasarana tersebut:
  - a. Minta bantuan kepada orang tua siswa melalui rapat komite sekolah
  - b. Minta bantuan kepada pemerintah
  - c. Minta bantuan kepada alumni
  - d. Minta bantuan kepada pengusaha
  - e. ....
3. Apa kendala kendala yang Bapak/Ibu temui dalam melengkapi sarana dan prasarana sekolah .....
4. Usaha yang dilakukan untuk mencegah anak putus sekolah:
  - a. Membebaskan uang SPP
  - b. Membebaskan uang masuk
  - c. Memberikan beasiswa
  - d. Mencarikan orang tua asuh
  - e. ....
5. Upaya pemerintah daerah mendorong siswa untuk masuk SD/SMP:
  - a. Mensosialisasikan kebijakan/program W-9-T
  - b. Membangun unit sekolah baru (USB)
  - c. Membangun SLTP satu atap
  - d. Menyelenggarakan SMP Terbuka
  - e. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada masyarakat untuk membangun sekolah baru (sekolah dan madrasah/pesantren)

6. Upaya masyarakat dalam usaha menyukseskan kegiatan W-9-T:
  - a. Mewakafkan tanah untuk membangun sekolah baru
  - b. Gotong royong membangun sekolah
  - c. Mencari donatur
  - d. ....
  
7. Kendala yang Bapak/Ibu temui dalam usaha menyukseskan kegiatan W-9-T di sekolah yang menjadi tanggung jawab Bapak/Ibu? .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
  
8. Menurut Bapak/Ibu apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyukseskan W-9-T? .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
  
9. Menurut Bapak/Ibu apa yang menyebabkan mereka harus ke luar dari sekolah:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  
10. Jika dilihat pada orangtua siswa, menurut Bpk/Ibu ekonomi orangtua di daerah kerja Bpk./Ibu bisa menjadi penyebab anak-anak mereka putus sekolah?
  - a. Ya
  - b. Tidak

**Alasannya** .....  
 .....  
 .....
  
11. Menurut Bpk./Ibu faktor apa lagi (yang bersumber dari orang tua) yang menyebabkan anak-anak mereka tidak tamat sekolah?
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....

12. Apakah kondisi sekolah (jumlah ruangan dan keadaan bangunan) sudah memadai untuk menampung anak-anak untuk bersekolah?

- a. Sudah Memadai
- b. Belum Memadai

Alasannya: .....

.....

.....

.....

13. Apa usulan Bpk/Ibu untuk memperbaiki kondisi sekolah?

- a. ....
- b. ....
- c. ....

14. Apa saja kebijakan pemerintah yang Bapak/Ibu ketahui untuk menyukseskan kegiatan W-9-T?

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....
- f. ....

15. Sumber pembiayaan pendidikan:

- a. Pemerintah pusat
- b. Pemerintah daerah
- c. Swadaya masyarakat
- d. ....

16. Apa pendapat Bpk/ibu tentang kebijakan pemerintah tersebut?

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....

17. Apa saran Bapak/Ibu agar W-9-T bisa terlaksana dan tercapai secara baik?

- a. Kepada pemerintah .....
- b. Kepada orangtua .....
- c. Kepada tokoh masyarakat .....
- d. Kepada ninik mamak .....
- e. dll

18. Bagi anak-anak yang tidak tamat sekolah, mereka bisa mengikuti pendidikan dan mendapatkan ijazah **Paket A** dan atau **Paket B**, apa komentar Bpk/Ibu tentang peran kelompok belajar tersebut untuk menyukkseskan W-9-T? .....

.....  
.....  
.....

19. Lembaga pendidikan yang ada di sekitar ini:

- a. Pesantren
- b. Madrasah Ibtidaiyah/Tsanawiyah
- c. SMP Terbuka
- d. ....